

LAPORAN TAHUNAN



2024

Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ambon

KATA PENGANTAR



Laporan tahunan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, serta perkembangan kegiatan pembangunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak, terutama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta instansi atau lembaga lain yang membutuhkannya. Selain itu, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sepanjang tahun tersebut.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai kekurangan, begitu pula dengan hasil yang telah dicapai. Namun, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Demikian laporan ini disusun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon serta sejauh mana tugas dan fungsinya telah dijalankan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ambon, Februari 2025
Kepala Pelabuhan,

Jafar Sahubauwa, S.St.Pi
NIP. 19761210 200212 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian maupun tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tersebut. Capaian ini tercermin dalam perkembangan realisasi anggaran, operasional pelabuhan, implementasi program dan kebijakan, serta akuntabilitas kinerja.

Secara operasional, PPN Ambon mencatat aktivitas pendaratan hasil tangkapan ikan dari kapal penangkap dengan berbagai jenis alat tangkap. Volume produksi ikan yang didaratkan mencapai 2.627 ton, melampaui target produksi sebesar 2.061 ton (127%) dan mengalami peningkatan sebesar 31,32% dibandingkan tahun 2023 (2.001 ton). Pukat cincin pelagis kecil menjadi alat tangkap yang mendominasi tangkapan (47,79% dari total produksi). Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), produksi terbesar berasal dari WPP 714 (Laut Banda) sebanyak 1.770 ton (67,38%), diikuti oleh WPP 718 (Laut Arafura) sebanyak 565 ton (21,51%), dan WPP 715 (Laut Maluku) sebanyak 292 ton (11,11%). Dari segi pemasaran, distribusi hasil tangkapan didominasi oleh tujuan regional sebesar 64,68% yaitu ke Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur, sementara ekspor mencapai 21,27% dengan tujuan Vietnam, Filipina, Thailand berupa tuna loin beku, sedangkan distribusi lokal sebesar 14,05% disalurkan ke pasar tradisional di Ambon.

PPN Ambon juga aktif dalam pengendalian mutu hasil tangkapan melalui inspeksi dan uji organoleptik, serta penerapan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB). Jumlah penerbitan S-CPIB selama tahun 2024 mencapai 17 lembar (hingga periode Oktober 2024). Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pelabuhan perikanan tidak lagi menerbitkan Sertifikat CPIB sejak 10 Oktober 2024.

Pelayanan persetujuan berlayar (SPB) selama tahun 2024 mencapai 549 lembar, mengalami kenaikan sebesar 23,9% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 443 lembar. Peningkatan ini sejalan dengan jumlah kapal berukuran di bawah 30 GT yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kapal-kapal yang berukuran di atas 30 GT. Kapal-kapal berukuran di bawah 30 GT memiliki hari operasi yang lebih pendek sehingga berpengaruh pada frekuensi kunjungan dan keberangkatan.

Dalam pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK), jumlah yang diterbitkan pada tahun 2024 mencapai 572 lembar, meningkat 26,83% dari 451 lembar pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi serta intensitas kunjungan kapal.

Dalam pelayanan Penerbitan Lembar Awal (LA) dan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LT/LTS), jumlah penerbitan Lembar Awal (LA) pada tahun 2024 mencapai 853 lembar, mengalami peningkatan signifikan sebesar 656% dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 130 lembar. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan tuna (loin) dari nelayan-nelayan pancing tuna (hand line) yang tersebar di kota ambon dan sekitarnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan nelayan terhadap regulasi penangkapan ikan yang legal, berkelanjutan, serta ketertelusuran hasil tangkapan. Selain itu, meningkatnya permintaan pasar ekspor turut mendorong penerbitan ini. Tahun 2024 juga menjadi tahun pertama PPN Ambon menerbitkan Lembar Turunan Sederhana (LTS), dengan total 31 dokumen yang diterbitkan.

Dalam aspek pendataan perikanan, PPN Ambon juga mencatat peningkatan dalam pengelolaan Logbook Penangkapan Ikan (LBPI) melalui diimplementasi Aplikasi Logbook Elektronik (SILOPI). Sepanjang tahun 2024, sebanyak 310 logbook diterima dan diverifikasi melalui sistem digital terintegrasi, meningkat 156% dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah 198 Logbook. Implementasi ini mendukung upaya transparansi dan akurasi data perikanan serta membantu pemantauan kegiatan perikanan yang lebih efektif.

Dalam aspek Manifest Sampah, guna mendukung salah satu agenda prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maka pengelolaan sampah merupakan salah satu program PPN Ambon dalam mencegah pencemaran lingkungan limbah khususnya plastik di laut karena memiliki rentang waktu penguraian yang sangat lama. Sepanjang tahun 2024, jumlah sampah yang diterima dari kapal perikanan mencapai 3.203,6 Kg.

Dalam aspek perbekalan, realisasi penyaluran BBM pada tahun 2024 mencapai 3.149 kiloliter, naik sebesar 129,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.370 kiloliter. Penyediaan air bersih mencapai 3.163 kiloliter, dengan kenaikan sebesar 144,44% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 1.294 kiloliter. Sementara itu, pasokan es pada tahun 2024 mencapai 2.271 ton, mengalami penurunan sebesar 52,36% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4.767 ton.

Dalam aspek sistem informasi, PPN Ambon juga berhasil meningkatkan pelaksanaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Sepanjang tahun 2024, PPN Ambon secara konsisten melakukan pencatatan dan pelaporan data operasional secara real-time melalui platform digital yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian ini mencakup entri data harian, bulanan, serta informasi situasional yang berkontribusi pada transparansi dan akurasi data pelabuhan. Berdasarkan evaluasi kinerja PIPP, PPN Ambon memperoleh skor dalam kategori "*Sangat Baik*" yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pengelolaan data dan pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.

Dalam aspek ketenagakerjaan, PPN Ambon juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 10.561 tenaga kerja (turun 13,82% dibanding 2023 sebesar 12.251 tenaga kerja) terserap dalam berbagai sektor di lingkungan pelabuhan, termasuk operasional pelabuhan, pengolahan hasil tangkapan, distribusi ikan, serta jasa pendukung lainnya. Sekalipun menunjukkan pengurangan dari jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya namun penyerapan tenaga kerja ini menunjukkan peran strategis PPN Ambon dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PPN Ambon juga mencatat pencapaian dalam penerapan prinsip Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, Kelestarian, dan Kebersihan (K5) melalui aplikasi SELARASKAN KKP. Sepanjang tahun 2024, PPN Ambon mencapai skor implementasi K5 sebesar 77,65% dengan kategori "*Baik*", yang mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan keselamatan kerja, optimalisasi keamanan pelabuhan, pemeliharaan ketertiban operasional, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kebersihan di area pelabuhan. Pencapaian ini juga didukung oleh peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung serta edukasi bagi tenaga kerja dan pengguna jasa pelabuhan.

Dalam aspek penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Ambon memiliki lahan industri seluas 35.308 m² yang dapat dimanfaatkan dengan skema penggunaan **sewa** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pada tahun 2024, realisasi pemanfaatan lahan industri mencapai 99,32% dari total luas lahan.

Dalam aspek keuangan, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,84% dengan nilai Rp14,24 miliar dari total pagu Rp14,26 miliar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,4 miliar atau 128,19% dari target yang ditetapkan. Namun, PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) pasca produksi belum mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp1,31 miliar atau 33,76% dari target Rp3,90 miliar. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah kapal yang beroperasi dengan skema pasca produksi serta menurunnya volume ikan yang didaratkan di PPN Ambon.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, PPN Ambon berhasil memperoleh nilai evaluasi kinerja dalam kategori "*Istimewa*" berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Keberadaan PPN Ambon diharapkan terus memberikan manfaat bagi sektor perikanan dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat tata kelola perikanan tangkap, serta mendukung pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Letak Strategis dan Geografis PPN Ambon.....	3
1.3. Potensi Perikanan Maluku.....	5
BAB II. ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN.....	8
2.1. Landasan Hukum.....	8
2.2. Tataan, Kedudukan dan Fungsi.....	10
2.3. Struktur Organisasi.....	11
2.4. Kepegawaian.....	12
2.5. Hubungan Kelembagaan / Lintas Sektor.....	18
2.6. Kegiatan Persuratan.....	20
BAB III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN.....	22
3.1. Organisasi Pengelola Anggaran.....	22
3.2. Alokasi Anggaran.....	22
3.3. Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV. PERENCANAAN KINERJA.....	27
4.1. Rencana Strategis.....	27
4.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan PPN Ambon.....	29
4.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	32
4.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.....	32
BAB V. AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
5.1. Akuntabilitas Kinerja.....	35
5.2. Akuntabilitas Keuangan.....	38
BAB VI. KERAGAAN OPERASIONAL PELABUHAN.....	42
6.1. Kedatangan / Kunjungan Kapal.....	42
6.2. Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan.....	45
6.3. Pemasaran dan Distribusi Hasil Tangkapan.....	48
6.4. Pembinaan dan Pengujian Mutu.....	51
6.5. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB).....	52
6.6. Pelaksanaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).....	53
6.7. Kesyahbandaran.....	55
6.7.1. Pelayanan Persetujuan Berlayar (SPB).....	56

6.7.2. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK)	58
6.7.3. Manifest Sampah	60
6.7.4. Logbook Penangkapan Ikan (LBPI).....	61
6.7.5. Lembar Awal (LA) dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) – LT/LTS .	63
6.7.6. Penangkapan Ikan Terukur mendukung PNBP SDA Pasca Produksi	64
6.8. Pelayanan Perbekalan	66
6.8.1. Perbekalan Es.....	66
6.8.2. Penyaluran BBM	68
6.8.3. Penyaluran Air Bersih	69
6.9. Sarana dan Prasarana Pelabuhan.....	71
6.10. Penggunaan Lahan dan Fasilitas Pelabuhan	74
6.11. Investasi dan Peredaran Uang.....	76
6.12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA.....	78
6.13. Penyerapan Tenaga Kerja	81
6.14. Kegiatan Pendanaan Usaha Nelayan.....	82
6.15. Kegiatan K-5 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Kerja)	83
BAB VII. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	87
7.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Kegiatan Non Fisik).....	87
7.2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Kegiatan Fisik)	101
7.2.1. Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas	101
7.2.2. Pemeliharaan Fasilitas.....	104
7.2.3. Pengadaan Barang	107
7.3. Penghargaan/Prestasi.....	112
7.4. Kaleidoskop 2024	113
BAB VIII. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	123
8.1. Tim Kerja Operasional Pelabuhan	123
8.2. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.....	123
8.3. Tim Kerja Kesyahbandaran.....	124
8.4. Dukungan Manajerial	124
BAB IX. PENUTUP.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	14
Tabel 3. Kenaikan Pangkat Periode Tahun 2024.....	15
Tabel 4. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Golongan	16
Tabel 5. Persuratan PPN Ambon Tahun 2024	21
Tabel 6. Besaran Pagu Anggaran PPN Ambon Tahun 2024 (s.d. 31 Desember 2024)	24
Tabel 7. Realisasi dan Sisa Anggaran PPN Ambon TA. 2024	24
Tabel 8. Realisasi Penggunaan PNBPA TA. 2024	26
Tabel 9. Indikator dan Target Kinerja PPN Ambon Tahun 2024.....	33
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	36
Tabel 11. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2024	39
Tabel 12. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2024	40
Tabel 13. Jumlah Kapal yang Beraktifitas di PPN Ambon Tahun 2024.....	43
Tabel 14. Jumlah dan Ukuran Kapal yang Beraktifitas di PPN Ambon Tahun 2024.....	44
Tabel 15. Perbandingan Produksi dan Nilai Produksi Ikan Tahun 2023 - 2024	47
Tabel 16. Distribusi dan Pemasaran Tahun 2024	49
Tabel 17. Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Periode Tahun 2020 -2024	50
Tabel 18. Pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu Ikan dan Uji Nilai Organoleptik	52
Tabel 19. Pelaksanaan Penerbitan S-CPIB di PPN Ambon Tahun 2024.....	53
Tabel 20. Penerbitan SPB Berdasarkan Jenis Kapal dan API Tahun 2024	57
Tabel 21. Penerbitan SPB Berdasarkan API dan Ukuran Kapal Tahun 2024.....	58
Tabel 22. Rekapitan Penerbitan STBLKK Masuk dan Kunjungan Kapal Berdasarkan API	59
Tabel 23. Jumlah Logbook yang Diterima Tahun 2024	62
Tabel 24. Jumlah Lembar Awal (LA) SHTI yang Diterbitkan.....	64
Tabel 25. Realisasi PNBPA SDA di PPN Ambon Tahun 2024.....	65
Tabel 26. Rincian Realisasi PNBPA SDA di PPN Ambon per Bulan Tahun 2024.....	66
Tabel 27. Volume Penyaluran Es Tahun 2024.....	67
Tabel 28. Volume Penyaluran BBM Tahun 2024	68
Tabel 29. Volume Penyaluran Air Bersih Tahun 2024	70
Tabel 30. Fasilitas Pokok di PPN Ambon	72
Tabel 31. Fasilitas Fungsional di PPN Ambon	73
Tabel 32. Fasilitas Penunjang di PPN Ambon.....	73
Tabel 33. Penggunaan Lahan PPN Ambon Tahun 2024	75
Tabel 34. Investasi di Kawasan PPN Ambon	76
Tabel 35. Peredaran Uang di PPN Ambon Tahun 2024	77
Tabel 36. Peredaran Uang di PPN Ambon Tahun 2020 - 2024.....	78
Tabel 37. Hasil Pungutan PNBPA Tahun 2024	78
Tabel 38. Realisasi PNBPA per Bulan Tahun 2024	80
Tabel 39. Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2024	81
Tabel 40. Penyerapan Tenaga Kerja Periode Tahun 2020 - 2024	82
Tabel 41. Data Pengumpulan Sampah dari Kapal	85
Tabel 42. Hasil Keputusan Bersama pada Forum Konsultasi Publik.....	95
Tabel 43. Pelaksanaan Bimtek SKN Tahun 2024	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi PPN Ambon	4
Gambar 2. Peta Wilayah Pengembangan (Gugus Pulau) Provinsi Maluku.....	5
Gambar 3. Struktur Organisasi PPN Ambon Tahun 2024	12
Gambar 4. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPN Ambon Tahun 2024	35
Gambar 5. Aktifitas Kunjungan Kapal Perikanan	43
Gambar 6. Kapal Wisata yang Berkunjung ke PPN Ambon	44
Gambar 7. Aktifitas Pendaratan Hasil Tangkapan	45
Gambar 8. Grafik Volume Produksi Berdasarkan Alat Penangkap Ikan	45
Gambar 9. Grafik Volume Produksi Menurut Kelompok Ikan dan WPP.....	46
Gambar 10. Grafik Volume dan Nilai Produksi Tahun 2020 - 2024.....	48
Gambar 11. Grafik Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Tahun 2020 - 2024	50
Gambar 12. Pengukuran Suhu Ikan dan Uji Organoleptik	51
Gambar 13. Alur Pelayanan Penebitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	56
Gambar 14. Alur Pelayanan Penerbitan STBLKK Masuk	59
Gambar 15. Penyerahan dan Pengambilan Kantong Plastik di Kapal Perikanan	61
Gambar 16. Tampilan Aplikasi Sistem Logbook Penangkapan Ikan (SILOPI).....	62
Gambar 17. Grafik Penyaluran Es di PPN Ambon, Tahun 2020 - 2024.....	68
Gambar 18. Grafik Penyaluran BBM, Tahun 2020-2024	69
Gambar 19. Grafik Penyaluran Air Bersih, Tahun 2020-2024	70
Gambar 20. Gedung Perkantoran Adminitrasi dan Dermaga PPN Ambon	74
Gambar 21. Balai Pertemuan Nelayan dan Pos Jaga Keamanan	74
Gambar 22. Penyampaian Informasi Pendanaan Usaha.....	83
Gambar 23. Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Kerja	83
Gambar 24. Penyerahan Kantong Sampah kepada Awak Kapal	84
Gambar 25. Pemungutan Sampah di Kolam Pelabuhan	84
Gambar 26. Tampilan Aplikasi SELARASKAN KKP	85
Gambar 27. Hasil Implementasi SELARASKAN KKP Tahun 2024	86
Gambar 28. Sosialisasi Pemanfaatan BMN Cara Sewa di Pelabuhan Perikanan	87
Gambar 29. Pertemuan LPP WPPNRI 715	90
Gambar 30. Sosialisasi SELARASKAN di Pelabuhan Perikanan	91
Gambar 31. Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Hasil Tangkapan Ikan Melalui Log Book	92
Gambar 32. Sosialisasi dan Gerai Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP).....	94
Gambar 33. Forum Konsultasi Pelayanan Publik Tahun 2024	96
Gambar 34. Bimtek SKN di Namlea, Kab. Buru	98
Gambar 35. Bimtek SKN di Dusun Waeyoho, Desa Kawa, Kab. Seram Bagian Barat	98
Gambar 36. Bimtek SKN di Desa Pelauw, Kab. Maluku Tengah	99
Gambar 37. Kegiatan Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	100
Gambar 38. Pekerjaan Rehab Rumah Ibadah	102
Gambar 39. Pekerjaan Rehab Gudang	102
Gambar 40. Pekerjaan Pembuatan Jalan Trotoar.....	103
Gambar 41. Pekerjaan Interior Room Control	103
Gambar 42. Pekerjaan Rehab Drainase.....	104
Gambar 43. Pemeliharaan Panel Induk Listrik dan Lampu Jalan Kawasan Kantor.....	105
Gambar 44. Perbaikan Pipa Instalasi Air.....	105
Gambar 45. Forklift.....	106
Gambar 46. Pemeliharaan Dermaga.....	106
Gambar 47. Pemeliharaan Gedung Bertingkat	107
Gambar 48. Pengadaan TV LED Polytron	107

Gambar 49. Pengadaan Video Wall Controller	108
Gambar 50. Pengadaan Video Conference	108
Gambar 51. Pengadaan Laptop.....	109
Gambar 52. Pengadaan Telepon Seluler	109
Gambar 53. Pengadaan Perangkat SSB.....	110
Gambar 54. Pengadaan Printer	110
Gambar 55. Pengadaan Scanner	110
Gambar 56. Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Kerja	111
Gambar 57. Pengadaan Smartboard/Papan Tulis Interaktif	111
Gambar 58. Pengadaan PC Mini.....	111
Gambar 59. Pengadaan AC.....	112
Gambar 60. Pengadaan Kendaraan Roda 2	112
Gambar 61. Penghargaan Peringkat III Kategori Satker untuk Transaksi Digipay	112



OPEN DAILY NEWSPAPER



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau (FAO, 2023) dan memiliki wilayah perairan yang luas, yaitu 6,8 juta km², serta garis pantai sepanjang 108.000 km. Kondisi geografis ini menunjukkan potensi kelimpahan sumber daya perikanan yang besar (Anugrah & Alfarizi, 2021).

Dari segi sumber daya perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa potensi lestari sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12.011.125 ton per tahun. Potensi tersebut mencakup beberapa jenis perikanan laut, antara lain ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, biota bintang lunak, serta krustasea lainnya. Potensi lestari sumber daya ikan ini tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia (Komnaskajiskan, 2023).

Pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024. Dokumen ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP. Penyusunan rencana strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dapat direviu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam periode 2020–2024 meliputi:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;

2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dijalankan oleh seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, KKP juga melaksanakan berbagai kebijakan pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang mencakup aspek kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Sejalan dengan pelaksanaan arah dan kebijakan tersebut, KKP telah menetapkan lima program prioritas ekonomi biru, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu, yang digunakan sebagai lokasi kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan. Pelabuhan ini berfungsi sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau melakukan bongkar muat ikan, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang kegiatan perikanan. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan memiliki peranan strategis dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta mendukung operasional kapal-kapal perikanan. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1997 dengan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) hingga peningkatan status menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara pada tahun 2000, PPN Ambon telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan sektor perikanan di Maluku, khususnya di bidang perikanan tangkap.

Dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya, PPN Ambon mendukung berbagai aktivitas penangkapan ikan, mulai dari tambat labuh, bongkar muat, penyediaan logistik, pembinaan nelayan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, hingga mendorong pertumbuhan industri perikanan melalui kawasan industri perikanan yang tersedia.

Dalam rangka menciptakan keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, PPN Ambon sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan berbasis Ekonomi Biru dalam pembangunan nasional. Ekonomi Biru dalam pembangunan nasional berfokus pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap, yang memiliki sistem dinamis, kompleks, dan multidimensional. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain itu, PPN Ambon juga mendukung serta melaksanakan berbagai agenda dan program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, yaitu Kebijakan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) berbasis kuota, di mana PPN Ambon termasuk dalam Zona Penangkapan 03. Program prioritas DJPT ini merupakan terobosan nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan di sektor perikanan tangkap, dengan tujuan meningkatkan produksi, produktivitas, serta tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, sehingga sektor perikanan tangkap dapat berkembang secara berkelanjutan demi kesejahteraan nelayan.

1.2. Letak Strategis dan Geografis PPN Ambon

Secara geografis, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon terletak di perairan Teluk Ambon, tepatnya pada koordinat 128°11'20,36" BT - 03°40'32,05" LS,

berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Pandan Kasturi, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta Lokasi PPN Ambon

Provinsi Maluku berada dalam Zona 03 berdasarkan pembagian zona dalam program Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang termasuk dalam Zona 03 meliputi WPP NRI 714 (Laut Banda), WPP NRI 715 (Laut Seram), dan WPP NRI 718 (Laut Aru dan Laut Arafura). Dengan letak geografisnya yang strategis, PPN Ambon menjadi *home base* bagi kapal-kapal perikanan yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2015 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, yang mencakup wilayah sebagai berikut :

- a. Wilayah kerja, yang terdiri dari :
 - Wilayah kerja daratan seluas 5,3 Ha (lima koma tiga hektar) dan;
 - Wilayah kerja perairan seluas 48,60 Ha (empat puluh delapan koma enam puluh hektar).
- b. Wilayah Pengoperasian, yang terdiri dari :

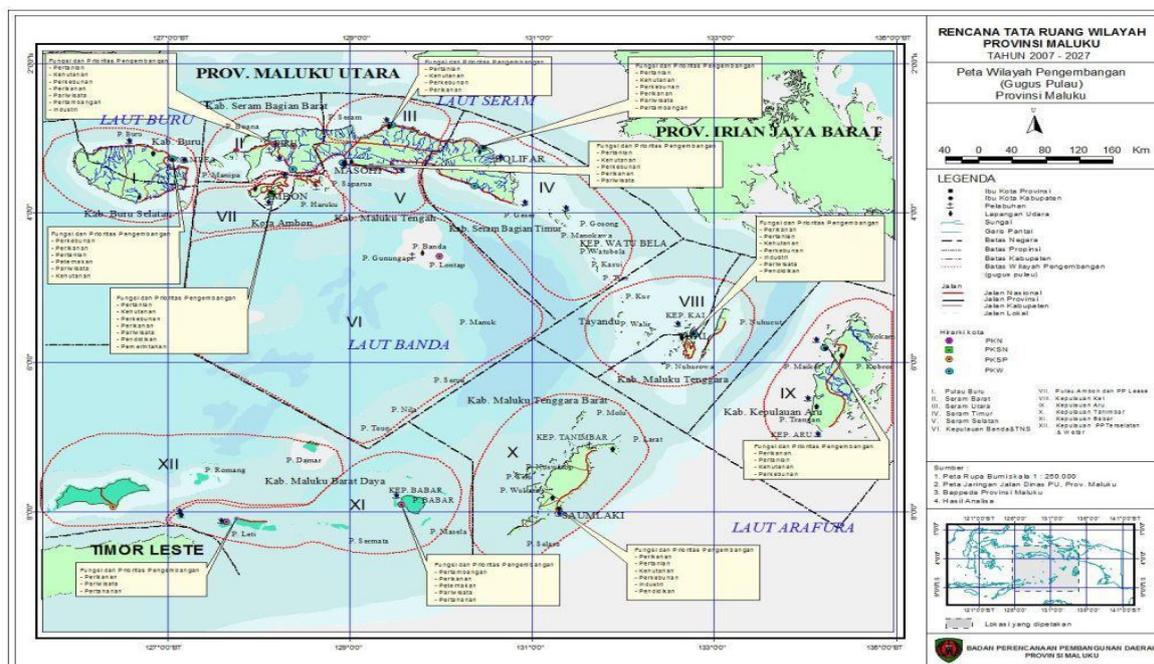
- Wilayah pengoperasian daratan seluas 29,848 Ha (dua puluh sembilan koma delapan ratus empat puluh delapan hektar) dan;
- Wilayah pengoperasian perairan seluas 155,22 Ha (seratus lima puluh lima koma dua puluh dua hektar).

1.3. Potensi Perikanan Maluku

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan mengusung pendekatan pembangunan wilayah berbasis konsep Laut Pulau dan Gugus Pulau. Konsep Laut Pulau memberikan justifikasi terhadap orientasi pembangunan dan pengembangan konektivitas melalui jaringan yang bersifat holistik, dengan memanfaatkan jejaring ekonomi dan ekologi ke arah Utara, Timur, dan Selatan. Dalam perkembangannya, jaringan konektivitas ke arah Barat juga menjadi kebutuhan penting.

Sementara itu, konsep Gugus Pulau (GP) bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitarnya dalam cakupan yang lebih luas. Batasan GP tidak didasarkan pada batas administrasi pemerintahan seperti kecamatan atau kabupaten/kota di Provinsi Maluku, melainkan lebih pada sektor atau komoditas unggulan yang dapat menciptakan skala ekonomi yang efisien, efektif, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (Renstra DKP) Provinsi Maluku Tahun 2019–2024, Provinsi Maluku dibagi menjadi 12 Gugus Pulau, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Gambar 2. Peta Wilayah Pengembangan (Gugus Pulau) Provinsi Maluku

Secara astronomis, Provinsi Maluku terletak antara 2°03' – 9° Lintang Selatan dan 124° – 136° Bujur Timur. Provinsi Maluku merupakan gugusan kepulauan yang berada di bagian timur wilayah Indonesia. Secara geografis, batas wilayah Provinsi Maluku meliputi :

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara dan Laut Seram;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Timor dan Australia;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Laut Banda;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Provinsi Papua dan Laut Arafura.

Provinsi Maluku dikenal sebagai Provinsi Seribu Pulau dengan luas wilayah administratif sebesar 712.479,65 km², yang terdiri atas perairan seluas 658.294,69 km² (92,4%) dan daratan seluas 54.185 km². Secara geografis, Maluku terletak di pusat sabuk Segitiga Terumbu Karang Dunia (*Coral Triangle*), menjadikannya daerah yang kaya akan sumber daya ikan. Provinsi ini memiliki 1.340 pulau, yang terdiri atas 1.336 pulau kecil dan 4 pulau besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023, potensi sumber daya perikanan di perairan Maluku diperkirakan mencapai 457.240 ton per tahun. Potensi tersebut terdiri atas berbagai kelompok ikan, seperti: ikan pelagis besar (termasuk tuna dan cakalang), ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, cumi-cumi, ikan karang. Sumber daya perikanan tersebut tersebar di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), yaitu:

- WPP-NRI 714: Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- WPP-NRI 715: Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
- WPP-NRI 718: Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan bagian timur Laut Timor.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlokasi di Provinsi Maluku. PPN Ambon bertugas melaksanakan fungsi kepelabuhanan perikanan serta melakukan pembinaan operasional pelabuhan perikanan.

Berdasarkan laporan statistik perikanan tangkap tahun 2024, produksi perikanan di PPN Ambon tercatat sebesar 2.627.057 kg, dengan nilai produksi mencapai Rp 69.923.979.750. Hasil produksi perikanan tersebut didistribusikan ke berbagai daerah di Provinsi Maluku, terutama ke pasar lokal di Kota Ambon serta beberapa

kabupaten lainnya. Selain itu, hasil tangkapan juga dipasarkan pada skala domestik maupun ekspor. Dampak positif dari hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPN Ambon turut berkontribusi terhadap capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Maluku. Per Desember 2024, berdasarkan data statistik NTN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai NTN di Maluku mencapai 112,03 (sumber: <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/ntn/tbl-statis>). Nilai NTN yang melebihi 100 mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima oleh nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kebutuhan atau pengeluaran mereka, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut.



ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN

BAB II. ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN

2.1. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon adalah:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2021 tentang *logbook* Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/KEPMEN-KP/2015 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Klaster Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – Tahun 2024;
28. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
29. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
30. Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor 4/PPN.A.KPA/OT.210/I/2024 tentang Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2024;

2.2. Tatanan, Kedudukan dan Fungsi

Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisien dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, adapun tatanan kepelabuhanan perikanan nasional memuat tentang : 1) fungsi pelabuhan perikanan; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) klasifikasi pelabuhan perikanan; dan 4) rencana induk pelabuhan perikanan nasional. Pelabuhan perikanan menyelenggarakan 2 (dua) fungsi utama guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran produknya, yang terbagi atas fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan.

a. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan serta pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yang meliputi :

- Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- Pelaksanaan kesyahbandaran;
- Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- Pemantauan wilayah pesisir;

- Pengendalian lingkungan;
- Kepabeanan; dan/atau
- Keimigrasian.

b. Fungsi Pengusahaan

Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan, yang meliputi :

- Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- Pelayanan bongkar muat ikan;
- Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- Pemasaran dan distribusi ikan;
- Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- Wisata bahari; dan/atau
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Struktur Organisasi

Sejak bulan Januari 2024, Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor: 4/PPN.A.KPA/OT.210/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON TAHUN 2024



Gambar 3. Struktur Organisasi PPN Ambon Tahun 2024

Struktur organisasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, di mana susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri atas :

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara;
2. Kepala Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Pelaksana;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4. Kepegawaian

2.4.1. Komposisi Pegawai

Pada tahun 2024, komposisi jumlah pegawai PPN Ambon adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) orang ASN dan 15 (lima belas) orang PPNPN. Pada bulan Maret 2024, dengan diterimanya Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan No. 74/MEN-SJ.3/KP.331/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Pengangkatan **PPPK an Batih Shendy Capri Hareva, A.Md.** dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 104/MEN-SJ.3/KP.331/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 a/n. **Mohamad fadel Triyogo, S.Tr.Pi.** maka 2 (dua) orang PPPK telah bergabung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Namun selanjutnya terjadi perubahan komposisi pada bulan April 2024, terjadi pengurangan pegawai dengan adanya pindah tugas ASN atas nama **Raden Andaru Rahadi Basuki, S.Psi** ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Perubahan komposisi pegawai terjadi di bulan Mei 2024 dengan meninggalnya PNS atas nama **La Edi (NIP. 197505052007011003)** pada tanggal 27 Mei 2024 di Rumah Sakit Leimena Kota Ambon.

Pada bulan Juli 2024, terjadi penambahan komposisi pegawai dengan adanya proses perpindahan pegawai dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon atas nama **James Kaluntas, S.T.** Namun pada bulan yang sama, terjadi pengurangan komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon akibat mutasi 2 (dua) ASN, yaitu **Niko Haris Taale, A.Md** yang mutasi ke Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan **Melianus Kakori, A.Md** yang mutasi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

Pada bulan November 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 113/MEN-SJ.3/KP.431/IX/2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil telah terjadi mutasi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon ke Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman atas nama **Taufan Darma Sedayu, S.Tr.Pi.**

Terakhir, pada bulan Desember 2024, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 143/MEN-SJ.3/KP.431/XI/2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, telah terjadi mutasi pegawai dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon atas nama **Nur Tuharea.** Mutasi ini menyebabkan penambahan komposisi pegawai.

Hingga akhir Desember 2024, komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang, terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) orang ASN dan 15 (lima belas) orang PPNPN. Jumlah ASN yang ada sekarang ini sebenarnya cukup memadai, namun kualitas SDM-nya dianggap belum memadai dan masih diperlukan penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai kebutuhan agar organisasi berjalan efektif dan optimal.

Untuk itu, pada tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon masih merekrut sebanyak 15 orang PPNPN yang dikontrak selama masa hingga PPNPN menerima NIP sebagai PPPK pada tahun yang sama. Pegawai yang direkrut memiliki latar belakang pendidikan dengan berbagai disiplin ilmu dan akan ditempatkan pada berbagai tim kerja/bagian dengan jabatan pramubakti, pengemudi, dan petugas kebersihan.

Pada tahun 2024, komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, dengan proporsi 72% laki-laki dan 28% perempuan. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Pegawai Menurut Jenis Kelamin	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Pelabuhan	1	1	
2	Subbagian Umum	18	12	6
3	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	23	19	4
4	Tim Kerja Kelompok Operasional Pelabuhan	14	7	7
5	Tim Kerja Kelompok Kesyahbandaran	16	13	3
Jumlah		72	52	20

Pada tahun 2024, komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai merupakan lulusan Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1), yaitu sebanyak 30 orang (42%). Tingkat pendidikan lainnya meliputi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 25 orang (35%), Diploma 3 (D3) sebanyak 11 orang (15%), Strata 2 (S2) sebanyak 5 orang (7%), dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 orang (1%). Rincian data tingkat pendidikan pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Bagian / Seksi	Jumlah	Tingkat Pendidikan																		
			SD		SLTA			D3			D-IV		Strata - 1							Strata - 2	
			SD	SMP	SMA	SMEA	SUPM	Perikanan	Manajemen	Akuntansi	Perikanan	Manajemen	Perikanan	Teknik	Adm. Negara	Sosiologi	Hukum Islam	Ilmu Kelautan	Pendidikan	Perikanan	Hukum
1	Kepala Pelabuhan	1									1										
2	Sub. Bagian Umum	8			3		1			3											
3	Timja TKPU	5			3	1															
4	Timja Operasional Pelabuhan	2																			
5	Timja Kesyahbandaran	6			1			1												1	1

No	Bagian / Seksi	Jumlah	Tingkat Pendidikan																		
			SD	SMP	SLTA			D3			D-IV			Strata - 1						Strata - 2	
					SMA	SMEA	SUPM	Perikanan	Manajemen	Akuntansi	Perikanan	Manajemen	Perikanan	Teknik	Adm. Negara	Sosiologi	Hukum Islam	Ilmu Kelautan	Pendidikan	Perikanan	Hukum
6	Kelompok Fungsional	17			1		4	1	1	2		1	4							3	
7	PPPK	18			2		4	2			2		5	1			1	1			
8	PPNPN	15	1		5			1					4	1	1	1			1		
Jumlah		72	1	0	15	1	9	5	1	5	3	1	19	2	1	1	1	1	1	4	1

2.4.2. Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pada tahun 2024, sebanyak 7 (tujuh) orang ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memperoleh kenaikan pangkat. Adapun rincian kenaikan pangkat tersebut adalah sebagai berikut:

- Periode Februari 2024: 1 (satu) orang ASN memperoleh kenaikan pangkat pilihan.
- Periode April 2024: 2 (dua) orang ASN memperoleh kenaikan pangkat reguler dan 1 (satu) orang memperoleh kenaikan pangkat pilihan.
- Periode Oktober 2024: 2 (dua) orang ASN memperoleh kenaikan pangkat reguler.
- Periode Desember 2024: 1 (satu) orang ASN memperoleh kenaikan pangkat reguler.

Tabel 3. Kenaikan Pangkat Periode Tahun 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat, Gol, TMT		TMT	Jenis KP
					Lama	Baru		
Periode Februari 2024								
1	Wa Supiati, A.Md	19870418 200912 2 001	Pranata Keuangan Apbn Mahir	D3-Akuntansi	III/a	III/b	01 Februari 2024	Jabatan Fungsional
Periode April 2024								
1	Syachlan Sangadji	19670304 200312 1 003	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	SMEA-Perdagangan	III/a	III/b	01 April 2024	Reguler
2	Jafar Sahubauwa, S.St.Pi	19761210 200212 1 002	Kepala Pelabuhan	D4- Teknologi Penangkapan Ikan	IV/a	IV/b	01 April 2024	Reguler
3	Raden Andaru Rahadi Basuki, S.Psi	19910315 202012 1 004	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S1- Psikologi	III/a	III/b	01 April 2024	Jabatan Fungsional
Periode Oktober 2024								
1	La Nurdin	19730103 200701 1 005	Pengadministrasi Persuratan	SMA-IPS	II/c	II/d	01 Oktober 2024	Reguler
2	La Edi	19750505 200701 1 003	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	SMA-IPS	II/c	II/d	01 Oktober 2024	Reguler
Periode Desember 2024								
1	Mohamad Luthfi Aziz, A.Md	19950501 202012 1 004	Pengelola Keuangan	D3-Akuntansi	II/c	II/d	01 Desember 2024	Reguler

Berdasarkan hasil kenaikan pangkat pada tahun 2024, komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menurut tingkat golongan adalah sebagai berikut:

koordinasi, serta sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai PPN Ambon, sehingga mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. Partisipasi dalam berbagai kegiatan ini mengakibatkan adanya perjalanan dinas dengan total 233 perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sepanjang tahun 2024.

2.4.6. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Untuk membina dan meningkatkan disiplin serta tanggung jawab, membangun semangat kebersamaan dan nasionalisme, serta memfasilitasi penyampaian informasi dan arahan pimpinan bagi pegawai di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, apel rutin dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apel pagi, dilaksanakan menjelang masuk kantor, tepat pukul 07.30 WIT.
- Apel sore, dilaksanakan menjelang pulang kerja, tepat pukul 16.00 WIT (Senin–Kamis) dan 16.30 WIT (Jumat).

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/81/M.KT.00/2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi tanggal 14 Juni 2021, pelaksanaan apel pagi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon mengacu kepada tiga aspek penting, yaitu:

- a. Melaksanakan apel pada hari Senin pagi di setiap minggu;
- b. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap Minggu, dilaksanakan pada saat apel pagi; dan
- c. Membacakan naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jum'at di setiap minggu, dilaksanakan pada saat apel pagi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menerapkan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin hingga Jumat. Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat. Selama bulan Ramadan, jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN sebanyak 32

(tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) serta bimbingan teknis, baik secara daring maupun luring. Hal ini diwajibkan agar kompetensi pegawai mampu ditingkatkan sesuai dengan target Indeks Profesionalitas (IP) ASN yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Saat ini, pencarian program diklat dapat dilakukan secara luring, dengan menghadiri langsung setiap pertemuan diklat, maupun secara daring melalui *zoom meeting* atau aplikasi *e-milea* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.5. Hubungan Kelembagaan / Lintas Sektor

Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, terdapat hubungan kelembagaan antara berbagai instansi terkait atau lintas sektor yang berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan. Hubungan ini melibatkan interaksi dan koordinasi antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat, daerah, serta pihak swasta dan masyarakat nelayan. Masing-masing instansi/pihak terkait berperan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 Bab X Pasal 31, instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan terdiri dari:

- a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. TNI/POLRI;
- c. Imigrasi;
- d. Bea dan Cukai;
- e. Kesehatan Pelabuhan;
- f. Perhubungan Laut;
- g. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- i. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- j. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- k. Karantina Ikan;
- l. BUMN dan/atau BUMD; dan/atau
- m. Instansi terkait lainnya.

Hubungan kelembagaan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara semua pihak. Beberapa mekanisme koordinasi yang sudah berjalan sepanjang tahun 2024 yaitu:

1. **MoU (*Memorandum of Understanding*)**

Telah dilakukan penandatanganan MoU antara PPN Ambon dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam Ambon dengan MoU Nomor B.207/PPN.A/TU.210/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pelatihan, Magang, Penelitian dan Pengkajian serta Praktek Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan.

2. **Pelayanan Terpadu**

Instansi terkait yang melakukan pelayanan terpadu di ruang pelayanan PPN Ambon, yaitu:

- a. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon.
- b. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon.

3. **Forum Konsultasi**

Telah dilaksanakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama terkait dengan DJPT, yaitu Penangkapan Ikan Terukur dan *Technical Cooperation Guidelines* (TCG).

4. **Penerapan koordinasi pelayanan/kegiatan/program**

Untuk mempermudah proses melaksanakan kebijakan perlu adanya kerjasama dengan pihak terkait dan melibatkan interaksi dan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain:

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
- Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon
- UPTD Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes Kelas A Maluku
- Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon
- Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon
- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon
- Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) Ambon
- Satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BB3KP) Ambon
- Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon

- Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon
- Stasiun Meteorologi Kelas IV Maritim Ambon
- Polairud Polda Maluku
- Lantamal IX Ambon
- Bakamla Ambon
- Basarnas Ambon
- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan cabang Ambon
- Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon
- Lembaga pendidikan (Universitas Pattimura, Universitas Darussalam, Politeknik Perikanan Tual, SUPM Waiheru, dan SMA/SMK se wilayah Maluku)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon
- AP2HI (Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia), Yayasan MDPI (Masyarakat dan Perikanan Indonesia), Yayasan IPNLF Indonesia (International Pole and Line Foundation), *Global Environment Facility* (GEF) – 6.
- LPP WPP-NRI 714 dan 718
- Stakeholder LPP WPP-NRI 715
- Perbankan (Bank BTN cabang Ambon, Bank Mandiri cabang Ambon)
- PT. Pertamina cabang Ambon
- UPTD Pelabuhan Perikanan (PP. Sorong, PP. Fandoi, PP. Sanggeng, PP. Klademak, PP. Masohi), PP Ukurlaran dan PPN Merauke.

2.6. Kegiatan Persuratan

Pengelolaan persuratan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon telah dilaksanakan secara elektronik. Proses yang sebelumnya dilaksanakan melalui aplikasi e-Layar tersebut, kini telah beralih ke **Modul Korespondensi** yang terintegrasi dalam **Portal Collaboration Office** Kementerian Kelautan dan Perikanan. Platform digital ini memfasilitasi seluruh proses surat-menyurat secara terintegrasi, mencakup pembuatan surat, pengelolaan surat masuk dan keluar, disposisi elektronik, tanda tangan digital, pelacakan dan notifikasi, serta pengarsipan dokumen secara digital. Platform digital ini dapat diakses melalui laman <https://portal.kkp.go.id/>.

Selain dapat diakses melalui antarmuka berbasis web, *Portal Collaboration Office* KKP juga tersedia dalam bentuk aplikasi mobile, yang memberikan akses lebih

fleksibel sehingga pengelolaan persuratan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Selama tahun 2024 di PPN Ambon terdapat sebanyak 2.354 surat masuk, baik surat masuk *online* melalui aplikasi *Portal Collaboration Office* KKP maupun *offline* (seperti undangan rapat, surat pemberitahuan kedatangan dan/atau keberangkatan kapal) sedangkan surat keluar sebanyak 2.508. Surat masuk dan keluar terbanyak ada pada bulan Mei 2024 dan terendah pada bulan Januari 2024. Adapun jumlah surat masuk dan surat keluar di PPN Ambon tahun 2024 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Persuratan PPN Ambon Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Surat	
		Masuk	Keluar
1.	Januari	66	237
2.	Februari	128	280
3.	Maret	128	237
4.	April	183	148
5.	Mei	265	247
6.	Juni	258	149
7.	Juli	270	207
8.	Agustus	219	235
9.	September	266	208
10.	Oktober	228	196
11.	November	202	193
12.	Desember	141	171
Total		2.354	2.508

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024



BAB III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN

3.1. Organisasi Pengelola Anggaran

Organisasi pengelola anggaran PPN Ambon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
N a m a : Jafar Sahubauwa, S.St.Pi
N I P : 19761210 200212 1 002
- b. Pejabat Pembuat Komitmen
N a m a : Nurul Chanifah, S.Pi
N I P : 19720920 200112 2 001
- c. Bendaharawan Pengeluaran
N a m a : Wa Supiati, A.Md
N I P : 198704182009122001
- d. Bendaharawan Penerimaan
N a m a : Husna Papalia, A.Md
N I P : 198702172010122002
- e. Pejabat Penandatanganan SPM
N a m a : Moh Nurcahyadi, S.Pi
N I P : 198707102015031002
- f. Staf Pengelola Keuangan
- g. Para Pelaksana Kegiatan

Para pengelola anggaran sebagaimana tersebut di atas telah diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024.

3.2. Alokasi Anggaran

Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2024 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 032.03.2.622461/2024 tanggal 24 November 2023 yang bersumber dari APBN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada awal tahun anggaran adalah sebesar Rp13.589.371.000,- dengan rincian yaitu pagu Rupiah Murni sebesar Rp12.797.666.000,- serta pagu PNPB sebesar Rp791.705.000,-. Terdapat pagu blokir yang tercantum pada halaman IV DIPA sebesar Rp361.787.000,-.

Selama tahun 2024 telah dilakukan 12 kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1, tanggal 29 Januari 2024, revisi kewenangan DJA berupa pencatuman Blokir pada Hal IV DIPA yaitu pagu alokasi *automatic adjustment* sebesar Rp361.787.000,-;
2. Revisi ke-2, tanggal 20 Februari 2024, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA dan revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
3. Revisi ke-3, tanggal 5 April 2024, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, dan Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja;
4. Revisi ke-4, tanggal 4 Juni 2024, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA dan revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
5. Revisi ke-5, tanggal 11 Juli 2024, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA dan revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
6. Revisi ke-6, tanggal 28 Agustus 2024, revisi kewenangan KPA yaitu revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
7. Revisi ke-7, tanggal 16 Oktober 2024, revisi kewenangan Kanwil DJPb Maluku yaitu Perubahan Halaman III DIPA, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja, dan Pemenuhan Belanja Operasional;
8. Revisi ke-8, tanggal 6 November 2024, revisi kewenangan DJA yaitu Perubahan Halaman III DIPA, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja, Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional, dan Pemenuhan Belanja Operasional;
9. Revisi ke-9, tanggal 2 Desember 2024, revisi kewenangan Kanwil DJPb yaitu Perubahan Halaman III DIPA, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya, Penggunaan Realisasi PNPB diatas Targetnya, dan Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan;
10. Revisi ke-10, tanggal 11 Desember 2024, revisi kewenangan Kanwil DJPb yaitu Perubahan Halaman III DIPA, revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, dan Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan;

11. Revisi ke-11, tanggal 12 Desember 2024, revisi kewenangan KPA yaitu revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya;
12. Revisi ke-12, tanggal 31 Desember 2024, revisi kewenangan KPA yaitu revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya.

Tabel 6. Besaran Pagu Anggaran PPN Ambon Tahun 2024 (s.d. 31 Desember 2024)

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)
1	Belanja Pegawai	7.449.767.000
2	Belanja Barang	6.061.204.000
3	Belanja Modal	1.120.475.000
Total		14.631.446.000

3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 pencapaian pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, adalah sebesar Rp14.247.428.407,- atau mencapai 99,84% dari pagu DIPA sebesar Rp14.269.659.000,-, sedangkan realisasi anggaran sebelum diblokir adalah Rp14.631.446.00,- atau 97,38 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 22.230.593,- atau 0,16%. Sisa dana tersebut merupakan anggaran dari :

- a. Belanja Pegawai (51) sebesar Rp 0,-;
- b. Belanja Barang (52) sebesar Rp 22.230.593,-;
- c. Belanja Modal (53) sebesar Rp 0,-.

Realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon per jenis belanja dan per jenis kegiatan selama tahun anggaran 2024 sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi dan Sisa Anggaran PPN Ambon TA. 2024

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu x (1.000)	Realisasi Sebelum Blokir x (1.000)	%	Pagu Diblokir x (1.000)	Pagu Sesudah Blokir x (1.000)	Realisasi x (1.000)	%	Sisa Anggaran x (1.000)
1	2337 Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	43.000	43.000	100,00		43.000	43.000	100,00	0
	52. Belanja Barang	43.000	43.000	100,00		43.000	43.000	100,00	0

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu x (1.000)	Realisasi Sebelum Blokir x (1.000)	%	Pagu Diblokir x (1.000)	Pagu Sesudah Blokir x (1.000)	Realisasi x (1.000)	%	Sisa Anggaran x (1.000)
2	2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.719.640	1.481.210	86,13	229.068	1.490.572	1.481.210	99,37	9.362
	52. Belanja Barang	1.089.035	854.791	78,49	229.068	859.967	854.791	99,40	5.176
	53. Belanja Modal	630.605	626.419	99,34		630.605	626.419	99,34	4.186
3	2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000	6.000	75,00		8.000	6.000	75,00	2.000
	52. Belanja Barang	8.000	6.000	75,00		8.000	6.000	75,00	2.000
4	2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	115.382	100.643	87,23	14.739	100.643	100.643	100,00	0
	52. Belanja Barang	115.382	100.643	87,23	14.739	100.643	100.643	100,00	0
5	2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.745.424	12.616.575	98,99	117.980	12.627.444	12.616.575	99,91	10.869
	51. Belanja Pegawai	7.449.767	7.445.220	99,94		7.449.767	7.445.220	99,94	4.547
	52. Belanja Barang	4.805.787	4.681.795	97,42	117.980	4.687.807	4.681.795	99,87	6.012
	53. Belanja Modal	489.870	489.560	99,94		489.870	489.560	99,94	310
	Total	14.631.446	14.247.428	97,38	361.787	14.269.659	14.247.428	99,84	22.231

Dalam kegiatan perikanan tangkap ini terdapat pula kegiatan yang dibiayai oleh PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selama tahun 2024 realisasi penerimaan PNB Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebesar Rp1.433.418.332,- atau (128,19%) dari target penerimaan PNB 2024 sebesar Rp1.118.233.000,-. Penerimaan tersebut bersumber dari :

- 1) Penerimaan Fungsional sebesar Rp1.395.432.148,- merupakan realisasi dari Penerimaan Jasa Pelabuhan antara lain; jasa penggunaan kendaraan, jasa penggunaan tanah dan bangunan, jasa penggunaan sarana dan prasarana, jasa tambat/labuh, jasa pengadaan air, penggunaan *cold room*, jasa pas masuk kendaraan, jasa kebersihan pelabuhan, serta jasa pemakaian listrik;
- 2) Penerimaan Umum sebesar Rp3.897.880,- merupakan pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin melalui proses lelang Pemerintah, dan pendapatan lainnya; melalui Pemotongan SPM khusus untuk pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan khusus rumah dinas serta pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Pemerintah sebesar Rp34.088.304,.

Dari jumlah setoran ini, PPN Ambon berhak menggunakan sebesar 70,8 % dari total penerimaan/setoran, dan realisasi penggunaan selama tahun 2024 adalah sebesar Rp803.955.000,- (99,75%) dari pagu pengeluaran DIPA PNBP tahun 2024 sebesar Rp806.005.000,-. Realisasi penggunaan PNBP secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Penggunaan PNBP TA. 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu PNBP	Pagu PNBP.P	Realisasi Penggunaan (Rp)	Capaian (%)	Sisa (Rp)
	Belanja Barang					
1	Belanja Bahan (521211)	209.000.000		208.692.000	99,85	308.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)	55.035.000		55.035.000	100,00	-
	Belanja Modal					
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)	515.301.000		513.560.000	99,66	1.741.000
4	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (532121)	26.669.000		26.668.000	100,00	1.000
	Jumlah	806.005.000	-	803.955.000	99,75	2.050.000



PERENCANAAN KINERJA

BAB IV. PERENCANAAN KINERJA

4.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia di tahun 2045 yakni untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2020 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan Infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Salah satu misi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi

nasional yang kokoh dan maju serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut : **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Misi 1.** Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. **Misi 2.** Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan tangkap;
- c. **Misi 3.** Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap;
- d. **Misi 4.** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
- b. Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan tangkap, yaitu optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan; Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; Mengakselerasi reformasi tata Kelola dan perizinan usaha perikanan tangkap;
- c. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Dalam mendukung peran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan visi dan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2020-2024. Adapun Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2020 - 2024, yaitu :

VISI

"Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu untuk mewujudkan Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera "

MISI

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menjalankan 6 (enam) MISI, antara lain :

- a. Peningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan;
- b. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
- c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- d. Peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
- e. Peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta
- f. Reformasi birokrasi PPN Ambon.

Menjabarkan misi diatas, maka tujuan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon adalah :

- a. Meningkatkan produksi hasil tangkapan dan mutu hasil perikanan sehingga mampu menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing ;
- b. Memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan usaha perikanan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perikanan;
- d. Peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta
- e. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

4.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan PPN Ambon

Dalam rangka mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2024 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai. Target-target

int dituangkan dalam dokumen rencana kinerja anggaran tahun 2024. Dalam mencapai sasaran strategis, pada tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sedangkan Sasaran strategis PPN Ambon dalam rangka peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparaturnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, yang ingin dicapai dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan 1 **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat”** dengan indikator kinerja :
 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. Sasaran Kegiatan 2 **“Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Meningkat”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”**, dengan indikator kinerja :
 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. Sasaran Kegiatan 3 **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang Berdaya Saing”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat dan Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”**, dengan indikator kinerja :
 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Nusantara Ambon;
 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon”;
 - Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- d. Sasaran Kegiatan 4 **“Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang Optimal”**, untuk mendukung Sasaran

- Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat**” dengan indikator kinerja:
- Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- e. Sasaran Kegiatan 5 “**Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon**”, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab**” dengan indikator kinerja :
- Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;
- f. Sasaran Kegiatan 6 “**Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon**”, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat**” dengan indikator kinerja :
- Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan;
- g. Sasaran Kegiatan 7 “**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon**”, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**” dengan indikator kinerja :
- Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;
 - Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
 - Nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

4.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

4.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan tolok ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang diturunkan dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai berikut:

Tabel 9. Indikator dan Target Kinerja PPN Ambon Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)	1118,23
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)	2.061
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	84
		5 Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	65
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal	6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	45
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	30,1
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	275
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (Persen)	15
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	45,1
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	80
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	94
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	84
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	80
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	93,76
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	71
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	88,3



AKUNTABILITAS KINERJA



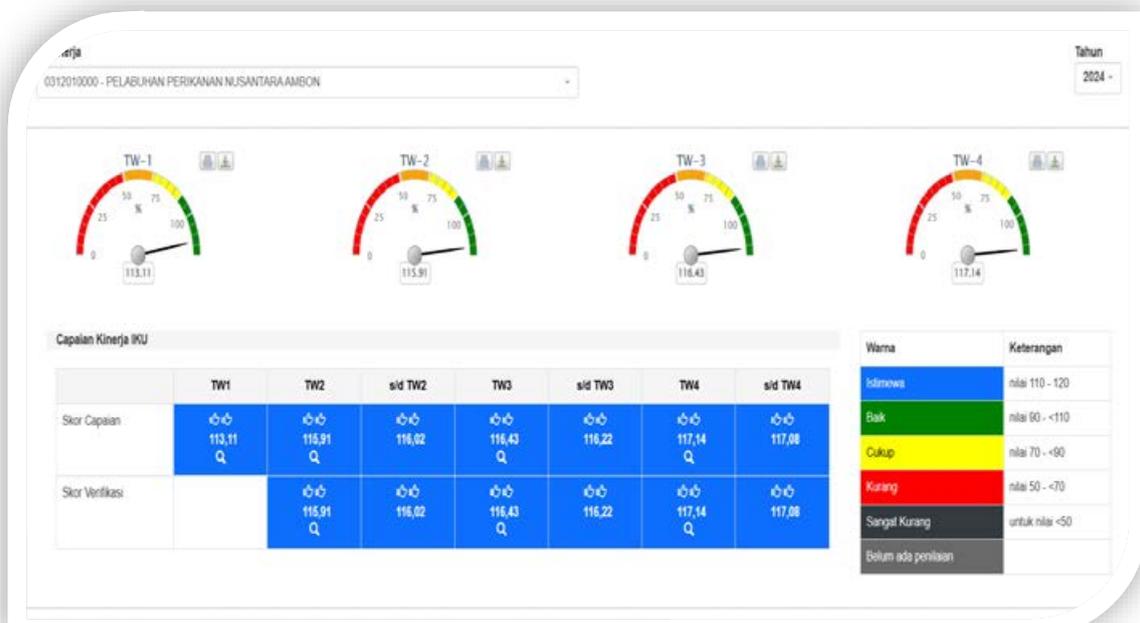
BAB V. AKUNTABILITAS KINERJA

5.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (Pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menitikberatkan pada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 4. Dashboard Aplikasi Kinerja PPN Ambon Tahun 2024

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2024 memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 116,43%. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) IK dengan capaian $\geq 100\%$ dan 1 (satu) IK dengan capaian $\leq 100\%$. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN		
			2024	TW IV	2024	%	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)	1.118,23	1.118,23	1.433,42	128,19
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)	2.061	2.061	2.627,06	127,47
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	100	100	100	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	84	84	91,17	108,54
		5	Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	65	65	98,73	151,89
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal	6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	45	45	83,76	186,13

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN		
			2024	TW IV	2024	%	
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	30,1	30,1	81,21	269,80
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	275	275	881	320,36
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	9	Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (Persen)	15	15	29,95	199,67
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	45,1	45,1	58,72	130,20
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	80	80	100	125
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	94,0	94,0	89,79	95,52
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	84	84	85,25	101,49
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	80	80	96,29	120,36

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN	
			2024	TW IV	2024	%
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	80	80	90	112,5
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	93,75	93,75	94,77	101,09
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	71	71	86,58	121,94
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	88,3	88,3	92,74	105,03

Capaian kinerja PPN Ambon Tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen di PPN Ambon. Dalam meningkatkan kinerja kedepan seluruh tim kerja sebagai penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja PPN Ambon agar melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian periode berikutnya. Komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup PPN Ambon diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

5.2. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di PPN Ambon Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 14,617,146,000 sesuai dengan DIPA PPN Ambon TA.2024 dengan Nomor: SP DIPA-032.03.2.622461/2024 tanggal 28 November 2023. Anggaran tersebut terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;

3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.247.429.972 atau sebesar 99.84 % dari total PAGU Anggaran Tahun 2024.

Tabel 11. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	43.000.000	43.000.000	100%	0%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.490.572.000	1.481.210.219	99.37%	0,63%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	6.000.000	75%	25%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	100.643.000	100.643.000	100%	0%
5	Program Dukungan Manajemen Internal	12.627.444.000	12.616.576.753	99,91%	0,09%
Jumlah		14.269.659.000	14.247.429.972	99,84%	0,16%

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua jenis efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$Presentase\ Efisiensi\ Biaya = 100\% - \left(\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} \times 100\% \right)$$

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan dalam rangka melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pada tahun 2024, pagu anggaran untuk semua kegiatan adalah Rp. 14.269.659.000,00,

sementara realisasi anggaran untuk semua program dan kegiatan yaitu Rp. 14.247.429.972,00. Dengan menggunakan rumus efisiensi, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0,16%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas pegawai sesuai dengan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh satker, yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang harus dicapai oleh masing-masing pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai setiap tahunnya. Selain itu, melalui pelibatan banyak pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas, pengadaan sarana dan prasarana, penggunaan tenaga ahli sebagai pemateri, dan memaksimalkan peran serta *stakeholder* dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja untuk petugas pelayanan.

Target anggaran yang ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBPN sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ambon	78.000.000	77.109.000	120%	98,86%
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Ambon Meningkat	86.840.000	86.840.000	120%	100%
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang berdaya saing	836.631.000	830.381.990	108,93%	99,25%
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang Optimal	608.744.000	606.522.229	120%	99,64%

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	13.787.000	13.787.000	120%	100%
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Ambon	37.213.000	35.213.000	120%	94,63
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Ambon	12.608.444.000	12.597.576.753	110,61%	99,91%
Jumlah/ Persentase		14.269.659.000	14.247.429.972	117,14%	99,84%



KERAGAAAN OPERASIONAL PELABUHAN

BAB VI. KERAGAAN OPERASIONAL PELABUHAN

Operasional pelabuhan perikanan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan baik fungsi pemerintahan maupun fungsi perusahaan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kegiatan operasional pelabuhan perikanan mencakup berbagai aspek mulai dari pelayanan kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran logistik, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Operasional pelabuhan juga mencakup kegiatan kesyahbandaran untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam pelaksanaannya, skala atau tingkat operasional pelabuhan perikanan tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sumber daya ikan dan intensitas aktivitas perikanan tangkap di wilayah sekitarnya, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas fasilitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan mendukung operasional pelabuhan tersebut. Keempat faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan seberapa optimalnya operasional suatu pelabuhan perikanan.

6.1. Kedatangan / Kunjungan Kapal

Salah satu fungsi pemerintahan pelabuhan perikanan yakni sebagai tempat pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, mengawasi kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta memberikan pelayanan kesyahbandaran. Tingkat keramaian pelabuhan sangat bergantung pada kunjungan/kedatangan kapal. Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, kapal-kapal yang berkunjung terdiri dari kapal pengangkut, kapal penangkap ikan, serta kapal non-perikanan. Untuk kapal non-perikanan tersebut dapat berupa kapal yang menunjang aktivitas kapal perikanan, maupun kapal yang tidak menunjang aktivitas kapal perikanan.

Kedatangan kapal perikanan ke PPN Ambon bertujuan untuk mendaratkan hasil tangkapan, mengisi perbekalan/logistik atau berkunjung karena keadaan darurat. Bagi kapal-kapal yang berpangkalan/berdomisili di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, tujuan kedatangan selain melakukan kegiatan bongkar-muat juga bertujuan melakukan persiapan operasional untuk kegiatan penangkapan selanjutnya.



Gambar 5. Aktifitas Kunjungan Kapal Perikanan

Untuk memudahkan pengaturan lalu lintas dan proses tambat labuh kapal perikanan di kolam pelabuhan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, pemberitahuan kedatangan kapal perikanan harus disampaikan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum memasuki pelabuhan bagi kapal perikanan berbendera asing, atau paling lambat 2 (dua) jam sebelum memasuki pelabuhan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia.

Kapal yang berkunjung ke PPN Ambon pada tahun 2024 terdiri dari kapal penangkap dan kapal pengangkut dengan izin daerah (< 30 GT) serta izin pusat (> 30 GT). Ukuran serta jenis alat tangkap kapal perikanan yang berkunjung dan beraktifitas di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Jumlah Kapal yang Beraktifitas di PPN Ambon Tahun 2024

Jenis Kapal dan API	Ukuran Kapal (GT)				Jumlah (Unit)	Persentase (%)
	30-60	31-60	61-100	>100		
Hand Line	2	-	-		2	2,82
Huhate	4	-	-		4	5,63
Jaring Hela Udang Berkantong	-	-	-	5	5	7,04
Pengangkut	12	1	3	3	19	26,76
Purse Seine	4				4	5,63
Rawai Tuna	8	1			9	12,68
Tonda	11				11	15,49
Pancing Cumi	10	1	1		12	16,90
Longline	5				5	7,04
Jumlah	56	3	4	8	71	100

Secara keseluruhan, jumlah kapal yang beraktifitas di PPN Ambon selama tahun 2024 tercatat sebanyak 71 unit. Jenis kapal dengan jumlah terbanyak adalah kapal pengangkut, sebanyak 19 unit (26,76%), diikuti oleh pancing cumi sebanyak 12 unit

(16,9%) dan diurutan ketiga adalah tonda sebanyak 11 unit (15,49%). Selanjutnya, kapal dengan alat tangkap *longline* dan jaring hela udang berkantong masing-masing sebanyak 5 unit (7%), *purse seine* sebanyak 4 unit (5,6%), dan huhate sebanyak 4 unit (5,6%). Jumlah dan kategori ukuran kapal berdasarkan izin pangkalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Jumlah dan Ukuran Kapal yang Beraktifitas di PPN Ambon Tahun 2024

Rincian	Ukuran Kapal (GT)		Total (Unit)
	≤ 30	≥ 30	
Semua Kapal	56	15	71
Kapal Berpangkalan	56	10	66
Kapal tidak Berpangkalan	-	5	5

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah unit kapal yang beraktifitas dan berpangkalan di PPN Ambon jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal yang tidak berpangkalan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara wilayah operasi kapal perikanan dengan pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam dokumen perizinannya. Aktifitas kapal perikanan setelah tiba dan tambat di pelabuhan yaitu melaporkan kedatangan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan membawa dokumen perizinan yang diperlukan untuk penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).

Selain kapal perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon juga dikunjungi oleh kapal-kapal non-perikanan yang tidak mendukung aktifitas perikanan. Kapal-



Gambar 6. Kapal Wisata yang Berkunjung ke PPN Ambon

kapal non-perikanan yang berkunjung merupakan kapal wisata dan kapal-kapal milik negara yang melakukan patroli maupun tugas kenegaraan lainnya. Tujuan kapal wisata yang berkunjung di PPN Ambon diantaranya menurunkan dan menaikkan

personil, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air bersih. Pemanfaatan fasilitas yang ada di PPN Ambon oleh kapal-kapal non-perikanan cukup berdampak pada peningkatan pendapatan negara melalui pembayaran tambat labuh.

6.2. Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

Volume produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon pada tahun 2024 mencapai 2.627 ton, meningkat sebesar 31,32% dibandingkan volume produksi pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 2.001 ton. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penambahan armada penangkapan berukuran di bawah 30 GT.



Gambar 7. Aktivitas Pendaratan Hasil Tangkapan

Hasil tangkapan yang didaratkan didominasi oleh hasil tangkapan kapal perikanan dengan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil sebanyak 1.256 ton (47,79%), diikuti pancing tonda sebanyak 654 ton (24,88%), rawai tuna sebanyak 269 ton (10,23%), pancing ulur sebanyak 248 ton (9,43%), jaring hela udang berkantong sebanyak 120 ton (4,58%), pancing cumi sebanyak 74 ton (2,81%), dan huhate sebanyak 7 ton (0,28%).

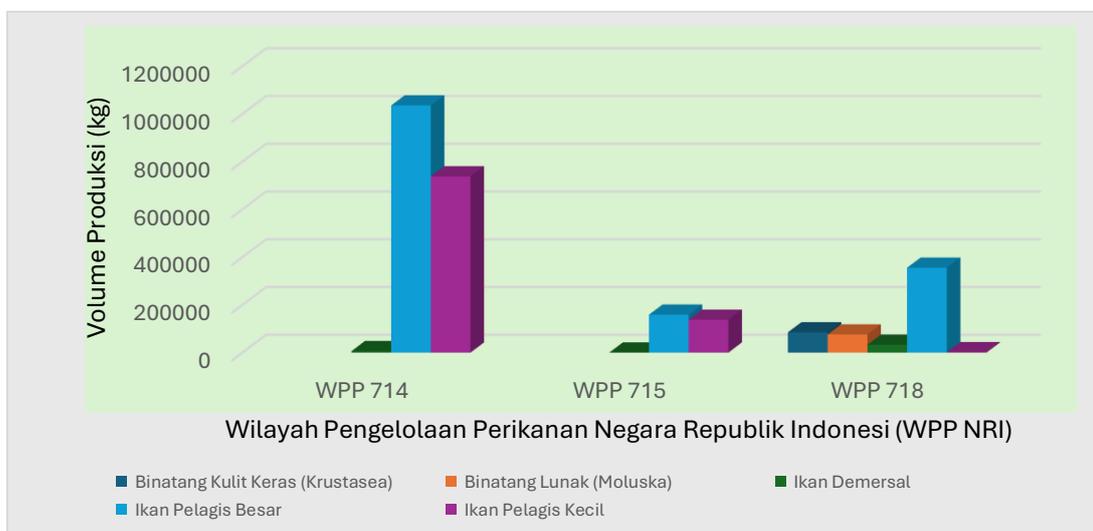


Gambar 8. Grafik Volume Produksi Berdasarkan Alat Penangkap Ikan

Jika berdasarkan jenis atau kelompok ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, volume produksi didominasi oleh kelompok ikan pelagis kecil sebanyak 1.550 ton (59%), diikuti oleh kelompok ikan pelagis besar sebanyak 877 ton (33,40%), kelompok binatang kulit keras sebanyak 85 ton (3,23%), kelompok binatang lunak sebanyak 76 ton (2,90%) dan yang terendah adalah kelompok ikan demersal sebanyak 39 ton (1,48%).

Volume produksi berdasarkan kelompok dan jenis ikan terbagi atas tiga kelompok, yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, dan demersal. Pada kelompok ikan pelagis kecil, produksi didominasi oleh ikan layang sebanyak 753 ton (28,66%) dan selar sebanyak 121 ton (4,62%) dari total ikan yang didaratkan. Diikuti oleh kelompok ikan pelagis besar, didominasi oleh ikan madidihang sebanyak 513 ton (19,51%), cakalang sebanyak 432 ton (16,45%), dan tongkol komu sebanyak 358 ton (13,63%). Selanjutnya pada kelompok ikan demersal, didominasi oleh ikan kurisi sebanyak 7 ton (0,29%), dan kuwe sebanyak 6 ton (0,23%). Untuk kelompok binatang lunak, didominasi oleh jenis cumi-cumi sebanyak 73 ton (2,79%), sedangkan pada kelompok binatang kulit keras, didominasi oleh udang windu sebanyak 66 ton (2,54%).

Berdasarkan hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2024 menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), produksi didominasi oleh hasil tangkapan dari WPP NRI 714 (Laut Banda) sebanyak 1.770 ton (67,38%), diikuti oleh WPP NRI 718 (Laut Arafura) sebanyak 565 ton (21,51%), dan WPP NRI 715 (Laut Maluku) sebanyak 292 ton (11,11%) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9. Grafik Volume Produksi Menurut Kelompok Ikan dan WPP

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kelompok ikan pelagis besar ditemukan di semua WPP NRI dengan volume produksi tertinggi pada WPP NRI 714, yakni sebanyak 1.035 ton atau 39,41% dari total volume produksi yang didaratkan di PPN Ambon. Selanjutnya, kelompok ikan pelagis kecil memiliki volume produksi dominan yaitu 738 ton (28,09%) di WPP NRI 714, dan diikuti oleh WPP NRI 715 sebanyak 138 ton (5,24%). Sementara itu, volume produksi terendah terdapat pada kelompok jenis ikan demersal, yang meskipun ditemukan di semua WPP NRI tetapi volume produksinya relatif kecil, yakni WPP NRI 718 sebanyak 32.718 kg (1,24%), WPP NRI 714 sebanyak 6.050 ton (0,23%), dan WPP NRI 715 sebanyak 108 kg (0,004%).

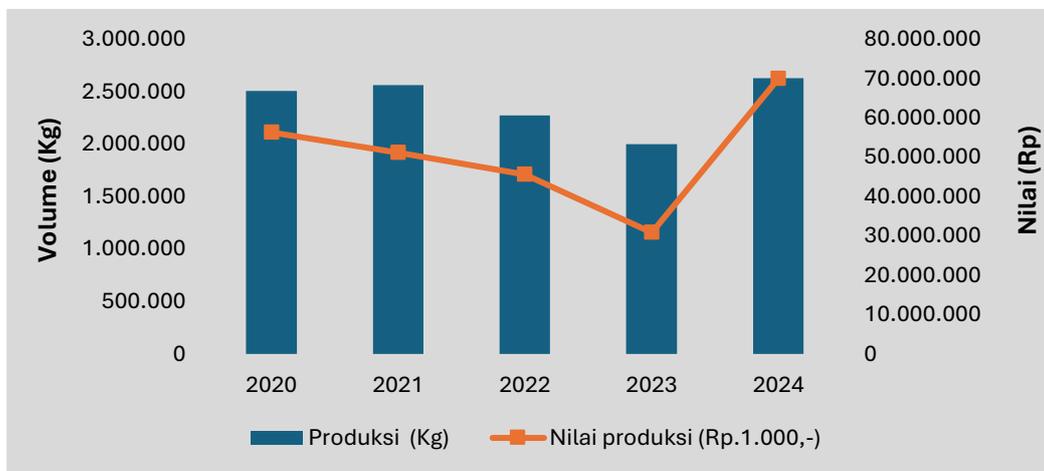
Berdasarkan target volume produksi tahun 2024 sebesar 2.061.000 kg (2.061 ton), realisasi pencapaian produksi mencapai 127%, yaitu sebanyak 2.627.057 kg (2.627 ton), dengan nilai produksi sebesar Rp. 69.923.979.750,- . Volume dan nilai produksi hasil pendaratan per bulan di PPN Ambon pada tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Produksi dan Nilai Produksi Ikan Tahun 2023 - 2024

Bulan	Tahun 2023		Tahun 2024		Harga rata-rata (Rp.)	
	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	2.000.000	47.210.548.530	2.061.000	32.806.717.174		
Jumlah	2.000.567	30.839.664.210	2.627.057	69.923.979.750	15.415	26.617
Kenaikan rata-rata (%)			31,32	126,73		72,66
Januari	93.132	1.408.484.400	132.348	4.101.280.000	15.124	30.989
Pebruari	135.580	2.474.421.600	198.674	5.786.404.000	18.251	29.125
Maret	128.343	2.255.956.000	211.708	5.552.642.500	17.578	26.228
April	141.537	2.642.062.000	188.686	4.765.509.000	18.667	25.256
Mei	80.616	1.938.250.000	229.427	6.948.341.000	24.043	30.286
Juni	125.677	2.735.372.000	205.142	6.207.386.000	21.765	30.259
Juli	117.393	1.280.107.000	223.576	4.871.173.000	10.904	21.788
Agustus	121.930	1.361.223.000	255.488	6.395.873.000	11.164	25.034
September	135.851	2.486.103.000	331.856	8.903.560.750	18.300	26.830
Oktober	298.693	4.341.006.940	202.167	5.273.227.000	14.533	26.084
November	309.406	3.792.317.520	209.166	5.660.089.500	12.257	27.060
Desember	312.409	4.124.360.750	238.819	5.458.494.000	13.202	22.856

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan produksi per bulan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan. Volume produksi tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan November dan Desember, sedangkan pada tahun 2024 puncaknya terjadi pada bulan September dengan volume mencapai 331.856 kg. Sementara itu, produksi terendah pada tahun 2023 tercatat pada bulan Mei dan pada tahun 2024 terjadi pada bulan Januari, yakni sebanyak 132.348 kg. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya volume produksi pada bulan tertentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan berupa iklim, cuaca, serta faktor lainnya berupa jumlah armada penangkapan, dan musim penangkapan.

Adapun volume produksi selama lima tahun terakhir (periode 2020-2024) sangat berfluktuasi, dengan persentase kenaikan sebesar 4,77%. Volume produksi tertinggi tercatat pada tahun 2024 yaitu sebesar 2.627 ton, sedangkan volume produksi terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2.001 ton, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 10. Grafik Volume dan Nilai Produksi Tahun 2020 - 2024

6.3. Pemasaran dan Distribusi Hasil Tangkapan

Untuk kegiatan pemasaran dan distribusi hasil tangkapan, pemilik kapal perikanan di PPN Ambon telah melakukan hubungan kerja sama dalam memasarkan hasil tangkapan dengan perusahaan perikanan yang ada di negara tujuan, daerah tujuan pasaran regional, dan pasaran lokal, sehingga ikan hasil tangkapan yang didaratkan telah memiliki tujuan pemasaran yang pasti. Adapun distribusi dan pemasaran hasil perikanan oleh unit pengolahan ikan (UPI) yang ada di PPN Ambon pada tahun 2024 meliputi 3 (tiga) tujuan pemasaran yaitu lokal, regional, dan ekspor, baik berupa produk ikan beku, ikan segar, maupun hasil olahan.

Tujuan pemasaran secara lokal yaitu didistribusikan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Pulau Ambon, sedangkan pada pemasaran regional (antar pulau/daerah) dengan tujuan yaitu Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Pada pemasaran dengan tujuan ekspor (luar negeri) biasanya didistribusikan ke Vietnam, Filipina, dan Thailand berupa produk tuna loin beku. Total volume dan nilai produksi yang dipasarkan serta didistribusikan dari PPN Ambon pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Distribusi dan Pemasaran Tahun 2024

Bulan	Distribusi Perusahaan						Total	
	Lokal		Regional		Eksport		Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)
	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)	Volume Produksi (Kg)	Nilai produksi (Rp.)		
Jumlah	420.845	8.724.423.206	1.936.967	47.628.275.999	637.000	49.920.000.000	2.994.812	106.272.699.205
Januari	97.194	1.675.247.106	57.204	1.813.954.000	26.000	2.080.000.000	180.398	5.569.201.106
Pebruari	10.065	211.335.200	63.278	3.912.122.000	39.000	3.120.000.000	112.342	7.243.457.200
Maret	7.000	156.000.000	162.431	4.988.639.799	13.000	1.040.000.000	182.431	6.184.639.799
April	25.894	586.165.400	303.273	8.016.799.500	39.000	3.120.000.000	368.167	11.722.964.900
Mei	41.429	884.672.900	49.146	1.905.686.200	104.000	8.320.000.000	194.575	11.110.359.100
Juni	51.111	975.698.600	28.177	2.305.308.500	26.000	2.080.000.000	105.288	5.361.007.100
Juli	31.170	679.118.100	162.000	1.849.000.000	26.000	2.080.000.000	219.170	4.608.118.100
Agustus	37.089	747.931.900	236.519	4.969.878.500	52.000	4.160.000.000	325.607	9.877.810.400
September	32.700	626.550.000	50.859	470.366.000	65.000	4.550.000.000	148.559	5.646.916.000
Oktober	21.234	434.404.000	255.948	5.731.909.000	117.000	9.360.000.000	394.182	15.526.313.000
Nopember	26.980	953.070.000	192.699	5.415.515.000	91.000	7.280.000.000	310.679	13.648.585.000
Desember	38.980	794.230.000	375.434	6.249.097.500	39.000	2.730.000.000	453.414	9.773.327.500

Total ikan yang didistribusikan melalui UPI di PPN Ambon pada tahun 2024 mencapai 2.995 ton. Distribusi ikan didominasi oleh skala regional sebanyak 1.937 ton (64,68%), diikuti oleh skala ekspor sebesar 637 ton (21,27%), dan skala lokal sebanyak 420 ton (14,05%). Distribusi ikan dari PPN Ambon pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,71% dibandingkan tahun 2023 (2.705 ton).

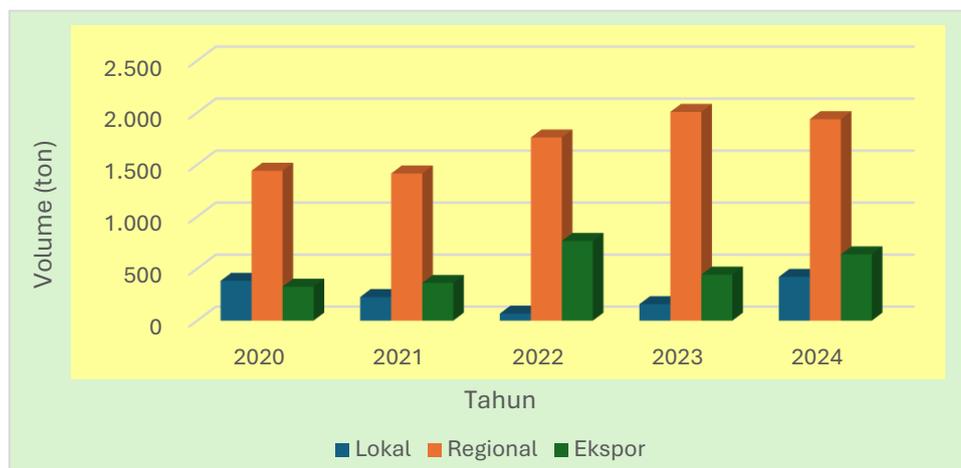
Distribusi dan pemasaran ikan di PPN Ambon mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dua faktor. Selain hasil tangkapan dari kapal perikanan berukuran <100 GT yang mendaratkan ikan di pelabuhan, distribusi juga dipengaruhi oleh pasokan hasil tangkapan yang masuk melalui jalur darat, yang dibeli oleh perusahaan dari nelayan-nelayan kecil di sekitar Pulau Ambon dan Pulau Seram. Adapun data

pemasaran dan distribusi ikan berdasarkan tujuan pemasaran selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Periode Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah (ton)	Distribusi Pemasaran (ton)		
		Lokal	Regional	Ekspor
2020	2.149	382	1.441	326
2021	2.005	227	1.415	362
2022	2.595	67	1.761	766
2023	2.607	158	2.007	442
2024	2.995	421	1.937	637
Jumlah	12.351	1.255	8.561	2.533

Berdasarkan wilayah distribusi dan pemasaran ikan, selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan sebesar 0,24%. Volume pemasaran dan distribusi tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2024, yakni sebanyak 2.995 ton. Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah tujuan distribusi dan pemasaran maka tahun 2023 mengalami peningkatan pada pasar regional/antar pulau, dengan volume mencapai 2.007 ton. Rata-rata produksi tahun 2020-2024 adalah sebesar 1.712 ton. Adapun data pemasaran dan distribusi ikan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 11. Grafik Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Tahun 2020 - 2024

6.4. Pembinaan dan Pengujian Mutu

Hasil perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perikanan nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa negara, pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bangsa pada umumnya, nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan, dengan tetap memelihara lingkungan, ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan. Untuk mewujudkan peranan tersebut, hasil perikanan Indonesia harus dapat memenuhi persyaratan yang dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat bersaing baik di pasar nasional maupun internasional yang akhirnya akan menjaga kestabilan dan peningkatan produksi serta pemasaran hasil perikanan.



Gambar 12. Pengukuran Suhu Ikan dan Uji Organoleptik

Tujuan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Dengan demikian, peran pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan ikan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga dapat menghasilkan produk-produk perikanan tangkap yang bermutu dan bernilai ekonomis tinggi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, PPN Ambon melakukan inspeksi pengendalian mutu (mengukur suhu ikan dan suhu palka ikan), dan uji organoleptik, yang hasil pelaksanaannya seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 18. Pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu Ikan dan Uji Nilai Organoleptic

No	Bulan	Jumlah kapal yang diinspeksi (Unit)	Rekapan SKH-IPM (Jumlah)	Sampel Organoleptik (Jumlah)
1	Januari	15	6	14
2	Februari	41	33	16
3	Maret	33	39	16
4	April	21	19	14
5	Mei	29	25	14
6	Juni	26	24	16
7	Juli	38	36	16
8	Agustus	40	37	16
9	September	40	40	16
10	Oktober	31	32	16
11	November	36	28	16
12	Desember	44	37	15
Total		394	356	185

6.5. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB)

Cara penanganan ikan yang baik, yang selanjutnya disebut CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran ikan dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan. CPIB menguraikan standar minimum yang perlu dipenuhi kapal penangkap ikan, termasuk (tetapi tidak terbatas pada): personel, fasilitas kapal, peralatan, pengawasan proses, hasil tangkap, dan operasi penanganan dan penyimpanan.

Salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjamin kualitas produk hasil perikanan tangkap adalah dengan melaksanakan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) melalui Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang menyebutkan bahwa Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan ikan. Adapun data penerbitan S-CPIB di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 19. Pelaksanaan Penerbitan S-CPIB di PPN Ambon Tahun 2024

No.	Nama Kapal	Pemilik	GT	Nomor SCPIB	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
1	KM. HMJ 4	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang	173	1-CPIB/714.81.7/III/2024	28 Maret 2024	28 Maret 2026
2	KM. Bintang Baru	Marjoto	6	2-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
3	KM. Arjuna	La Asudin	6	3-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
4	KM. Sepakat 02	Muslimin Dupa Taba	14	4-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
5	KM. Sinar Harapan Jaya 77	Sakka	4	5-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
6	KM. Mandala 4	Antonius Hartanto	29	6-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
7	KM. Cinta Bahari 7	Yansen Sangkay	58	7-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
8	KM. Cinta Bahari 8	Sarah Meizar Tulende	59	8-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
9	KM. Cinta Bahari 9	Calvin M. S. Papuling	59	9-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
10	KM. Cinta Bahari 12	Hendrik Sahempa	58	10-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
11	KM. Aspac 03	Alfred Pontoh	58	11-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
12	KM. Aspac 5	Jonny E. Sahempa	59	12-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
13	KM. Aspac 17	Butje H. Kuntel	57	13-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
14	KM. Mina Fintura 01	Wardin	59	14-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
15	KM. Mina Fintura 03	Alfred Pontoh	58	15-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
16	KM. Solavide	Zadrak Korano	58	16-CPIB/714.81.7/VI/2024	11 Juni 2024	11 Juni 2026
17	KM. Raja Bubara	Ade Setiawan	30	17-CPIB/714.81.7/IX/2024	20 September 2024	20 September 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka sejak **10 Oktober 2024** Pelabuhan Perikanan tidak lagi menerbitkan Sertifikat CPIB. Sertifikat CPIB dilaksanakan dan/atau diterbitkan oleh BP2MHKP.

6.6. Pelaksanaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) merupakan system informasi yang berfungsi untuk mendukung pengembangan pelabuhan perikanan dalam menciptakan kawasan andalan yang strategis, produktif dan cepat tumbuh sebagai sentra produksi dan industri bagi pengembangan ekonomi terpadu. PIPP menginformasikan dinamika kegiatan pelabuhan perikanan seluruh Indonesia kepada stakeholder kelautan dan perikanan melalui media internet pada situs <https://pipp.kkp.go.id> dengan dukungan data operasional pelabuhan pada masing-masing pelabuhan perikanan yang dikirim secara berkala.

Kegiatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon selama Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan dalam berbagai jenis kegiatan seperti :

- a. Entry data harian, bulanan dan situasional;
- b. Informasi mengenai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon yang dapat diakses melalui:
 - Website: <https://pipp.kkp.go.id>
 - Website KKP: kkp.go.id/djpt/ppnambon
 - Facebook: Humas PPN Ambon
 - Instagram: PPN Ambon
 - Twitter: PPN Ambon
 - YouTube: PPN Ambon
- c. Pelaksanaan publikasi : media sosial Humas PPN Ambon selalu aktif memberikan segala informasi perikanan tangkap, baik itu aktifitas pelabuhan maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan perikanan.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja pada laman Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang diperoleh pada tiap semester I dan II tahun 2024, kinerja PPN Ambon tergolong dalam kategori "**Sangat Baik**", dengan perolehan nilai rata-rata sebesar **89,85**, sebagai hasil dari penilaian atas 27 jenis kriteria.

6.7. Kesyahbandaran

Dalam rangka menjaga keselamatan operasional pelayaran kapal perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengangkat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, adapun tugas dan wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

- mengatur kedatangan kapal perikanan;
- memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan;
- mengatur keberangkatan kapal perikanan;
- menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan;
- menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- memeriksa log book penangkapan ikan;
- mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- mengawasi pemanduan;
- mengawasi pengisian bahan bakar;
- mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; dan
- memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan, kelompok kesyahbandaran telah menjalankan hampir keseluruhan dari tugas dan kewenangan yang diembankan oleh aturan. Terdapat 2 tugas yang selama ini belum dapat dijalankan oleh kelompok kesyahbandaran PPN Ambon yaitu mengawasi pemanduan serta mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan. Kedua hal ini tidak dapat

dijalankan karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon belum memiliki fasilitas (kapal pandu) dalam pelaksanaan tugas pemanduan, sementara itu untuk kegiatan pengawasan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan dilaksanakan oleh Timja TKPU.

6.7.1. Pelayanan Persetujuan Berlayar (SPB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diberlakukan dan diterbitkan secara online melalui alamat website www.integrasi.djpt.kkp.go.id. Aplikasi ini mencakup data kapal baik kapal berizin pusat maupun daerah. Penerbitan SPB dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan tangkap yang disahkan oleh Kepala Pelabuhan.

Alur penerbitan SPB di PPN Ambon dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 13. Alur Pelayanan Penebitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total SPB yang diterbitkan pada tahun 2024 sebanyak 549 lembar, meningkat sebesar 23,9% dari tahun 2023, di mana didominasi oleh kapal pengangkut sebanyak 199 lembar (36,2%), diikuti oleh kapal dengan alat tangkap pancing tonda sebanyak 169 lembar (30,8%), kapal dengan alat tangkap hand line sebanyak 65 lembar (11,8%), dan kapal dengan alat tangkap pancing cumi sebanyak 41 lembar (7,5%) dengan rincian seperti yang tertera pada tabel di bawah.

Tabel 20. Penerbitan SPB Berdasarkan Jenis Kapal dan API Tahun 2024

Bulan	Jenis Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (API)											Jumlah
	Tonda	Pengangkut	Hand line	Purse Seine	Pancing Cumi	Huhate	Long line	Pukat Labuh	Jaring Hela Udang Berkantong	Jala Jatuh Berkapal	Kapal Latih	
Januari	10	11	1	6	-	-	4	-	4	-	-	36
Februari	12	26	1	5	-	2	-	-	1	-	-	47
Maret	12	18	2	4	-	1	-	-	1	-	-	38
April	10	21	-	3	-	3	5	-	2	-	-	44
Mei	20	15	1	-	-	-	-	-	2	-	-	38
Juni	14	12	6	1	13	1	-	-	-	-	-	47
Juli	18	13	6	1	19	-	-	-	-	4	-	61
Agustus	21	15	12	3	9	3	-	-	2	-	-	66
September	17	13	13	2	-	-	2	-	-	-	1	48
Oktober	11	19	5	1	-	1	-	-	2	-	-	39
November	16	21	7	1	-	3	1	-	1	-	-	50
Desember	8	15	11	-	-	1	1	-	-	-	-	36
Total	169	199	65	27	41	15	13	0	15	4	1	549

Adapun penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2024 dipengaruhi oleh ukuran kapal (GT), frekuensi kunjungan dan waktu operasional kapal perikanan. Kapal-kapal dengan ukuran di bawah 30 GT memiliki hari operasi yang lebih pendek, sehingga berpengaruh pada frekuensi kunjungan dan keberangkatan. Sebagian besar kapal-kapal ini juga berpangkalan dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Ambon.

Jumlah kapal aktif yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2024 didominasi oleh kapal-kapal dengan ukuran di bawah 30 GT. Sebagian besar kapal-kapal ini juga berpangkalan dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Ambon. Tingginya penerbitan SPB bagi kapal-kapal di bawah 30 GT disebabkan oleh pendeknya hari operasi kapal-kapal tersebut, di mana lama operasi berkisar antara 5 sampai 14 hari untuk kapal dengan alat tangkap pancing tonda dan handline. Selain itu kapal-kapal pengangkut yang beroperasi di PPN Ambon juga memiliki ukuran di bawah 30 GT dengan hari operasi yang tidak lama (< 7 hari).

Adapun jumlah kapal yang aktif beroperasi dan berpangkalan di PPN Ambon berdasarkan ukuran kapal dan alat tangkap sesuai penerbitan SPB pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 21. Penerbitan SPB Berdasarkan API dan Ukuran Kapal Tahun 2024

Alat Tangkap	Jumlah Kapal Aktif yang Berpangkalan							Total (Unit)
	1-10 GT	11-20 GT	21-30 GT	31-50 GT	51-100 GT	101-200 GT	201-500 GT	
Gillnet/Jaring Insang	-	-	-	-	-	1	-	1
Handline/Pancing Ulur	-	24	41	-	-	-	-	65
Huhate/Pole and Line	-	-	15	-	-	-	-	15
Longline/Rawai Tuna	-	-	13	-	-	-	-	13
Pancing Cumi/Squid Angling	-	-	26	-	12	3	-	41
Pancing Tonda	-	45	115	-	-	-	-	169
Purse Seine	-	-	26	-	-	-	-	26
Pengangkut	-	1	78	13	49	31	27	199
Pukat Labuh	-	-	-	-	-	-	-	0
Jaring Hela Udang Berkantong	-	-	-	-	-	7	8	15
Jala Jatuh Berkapal	-	-	3	-	-	1	-	4
Kapal Latih	-	-	1	-	-	-	-	1
Total (Unit)	0	70	318	13	61	43	35	549

Dalam hal jumlah kapal aktif dan berpangkalan di PPN Ambon sebanyak 549 unit, didominasi oleh kapal-kapal dengan ukuran di bawah 30 GT, dengan rincian 70 unit berukuran 11-20 GT, 318 unit berukuran 21-30 GT, dan 161 unit berukuran di atas 30 GT.

6.7.2. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK)

Pelaporan kedatangan kapal perikanan dilakukan dengan membawa dan melaporkan logbook melalui akun nahkoda dan pemilik/pengurus kapal. logbook yang telah diverifikasi dan dokumen kapal perikanan kemudian diperiksa keabsahan, keaktifan (masa berlaku) dan kesesuaiannya. Setelah dokumen-dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya akan diterbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) kapal perikanan. Pelayanan penerbitan STBLKK di PPN Ambon tergambar pada ilustrasi dibawah.



Gambar 14. Alur Pelayanan Penerbitan STBLKK Masuk

Kapal perikanan yang melaporkan kedatangan terdiri dari kapal penangkap dan pengangkut. Bagi kapal penangkap wajib menyampaikan *logbook* (*elektronik*), kapal pengangkut melampirkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), dan bagi kapal pengangkut ikan hidup melampirkan Surat Keterangan Muat Ikan (SKMI). Secara keseluruhan, jumlah Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan (STBL kedatangan) kapal perikanan yang diterbitkan pada bulan Januari sd Desember tahun 2024 sebanyak 572 lembar, jika dibandingkan dengan tahun 2023 diperoleh 451 lembar maka terjadi kenaikan sebesar 26,83%. Adapun rekapan penerbitan STBL Kedatangan yang diterbitkan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 22. Rekapan Penerbitan STBLKK Masuk dan Kunjungan Kapal Berdasarkan API

Bulan	Hand Line	Huhate/ Pole and Line	Pancing Cumi/Squid Angling	Pancing Tonda	Peng-angkut	Purse Seine	Rawai Tuna	Jaring Hela Udang	Jala Jatuh Berkapal	Gillnet	Total
Januari	2	-	-	7	6	4	-	4	-	-	23
Februari	1	1	9	11	27	4	-	2	-	-	55
Maret	2	2	16	9	18	6	-	1	1	-	55
April	-	2	8	12	23	2	5	2	-	-	54
Mei	1	-	-	19	17	-	3	1	-	-	41
Juni	6	2	1	15	9	1	2	1	-	-	37
Juli	9	-	4	18	12	1	-	-	4	-	48
Agustus	11	1	4	17	15	4	2	-	-	1	55

Bulan	Hand Line	Huhate/ Pole and Line	Pancing Cumi/Squid Angling	Pancing Tonda	Peng- angkut	Purse Seine	Rawai Tuna	Jaring Hela Udang	Jala Jatuh Berkapal	Gillnet	Total
September	13	2	-	19	13	1	1	1	-	-	50
Oktober	7	1	-	11	19	2	-	3	-	-	43
November	11	2	-	9	19	1	1	1	-	-	44
Desember	21	3	7	9	18	-	3	-	6	-	67
Total	84	16	49	156	196	26	17	16	11	1	572

Berdasarkan data kunjungan/kedatangan kapal tahun 2024, diperoleh nilai rata-rata penerbitan STBLKK perbulan sebanyak 47 lembar. Jumlah kunjungan tertinggi sebanyak 67 kapal terjadi pada bulan Desember 2024. Dari data kapal aktif tahun ini, kapal pengangkut merupakan jenis kapal yang paling banyak berkunjung di PPN Ambon dengan persentase tertinggi sebanyak 196 kunjungan (34%), kemudian kapal dengan alat tangkap pancing tonda sebanyak 156 kunjungan (27,3%).

6.7.3. Manifest Sampah

Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut merupakan salah satu kebijakan yang mendukung agenda prioritas dari KKP, yang didukung oleh Pelabuhan perikanan Nusantara Ambon sejak tahun 2022. Pengelolaan sampah merupakan salah satu program pencegahan pencemaran lingkungan oleh limbah khususnya plastik di laut karena memiliki rentang waktu penguraian yang sangat lama.

Permasalahan sampah di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung. Hal ini menimbulkan dampak kerusakan luar biasa pada kehidupan laut. Selain mengotori lautan, sampah yang termakan dapat menyulitkan bahkan meracuni hewan laut. Selain mengganggu biota laut, sampah plastik juga berdampak pada terganggunya ekologi perairan. Beranjak dari beberapa alasan tersebut, PPN Ambon mengambil langkah untuk memberikan kantong plastik sebagai wadah untuk menampung sampah bagi kapal perikanan yang akan meninggalkan dermaga yang nantinya akan digunakan sebagai wadah penampungan sampah plastik di atas kapal yang akan diserahkan kembali saat tambat. Sampah yang terkumpul selanjutnya akan dibuang ke tempat penampungan oleh petugas kebersihan.



Gambar 15. Penyerahan dan Pengambilan Kantong Plastik di Kapal Perikanan

Himbauan pemisahan dan pengumpulan sampah secara terpisah antara sampah plastik (non organic) dan sampah organik bertujuan untuk menghindari pembuangan langsung (terutama sampah plastik) ke laut. Sampah yang dikumpulkan digolongkan dalam 2 jenis yakni sampah plastik dan non plastik.

Pemberian dan pengambilan kembali kantong sampah yang diberikan ternyata dapat meningkatkan kepedulian para awak kapal perikanan terhadap pengendalian sampah plastik di laut. Hal ini terlihat dari respon baik para nahkoda dan anak buah kapal dalam mendukung program ini.

6.7.4. Logbook Penangkapan Ikan (LBPI)

Logbook penangkapan ikan merupakan salah satu instrumen pendataan hasil perikanan selain berperan sebagai pendugaan stok ikan (*stock assesment*). Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Logbook sendiri telah mengalami perkembangan system dari manual ke elektronik dengan memanfaatkan gadget berbasis android. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan nelayan/nahkoda dalam mengisi menyimpan dan melaporkan data hasil tangkapannya. Penerapan logbook elektronik dilakukan dengan memanfaatkan system aplikasi induk yang telah ada (SILOPI). Kemudahan ini ditempuh pemerintah guna memberi keleluasaan bagi para nahkoda untuk menginput data hasil tangkapan melalui aplikasi (*paperless*) seperti pada gambar berikut.



Gambar 16. Tampilan Aplikasi Sistem Logbook Penangkapan Ikan (SILOPI)

Penerapan logbook elektronik (e-logbook) melalui aplikasi SILOPI pada tahun 2024 di PPN Ambon telah berjalan dengan maksimal di mana semua Logbook yang diterima telah terdata pada aplikasi. Semua kapal penangkap yang aktif di PPN Ambon telah melakukan aktivasi logbook elektronik. Aktivasi logbook dilakukan bagi kapal penangkap yang akan beroperasi dan belum memiliki akun. Selain itu bila terjadi kerusakan/kehilangan gawai (HP) maka dapat dilakukan pengaktifan kembali. Jumlah Logbook yang diterima dan diverifikasi sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 di PPN Ambon sebanyak 310 Logbook atau meningkat sebanyak 156% dari tahun 2023 (198 logbook) dengan jumlah aktivasi logbook elektronik sebanyak 29 kali pengaktifan. Jumlah verifikasi dan aktivasi logbook selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Jumlah Logbook yang Diterima Tahun 2024

Bulan	Penerapan e-Logbook (Kapal)	
	Verifikasi	Aktifasi
Januari	12	7
Februari	29	2
Maret	25	3
April	12	6
Mei	22	-
Juni	25	5
Juli	28	-
Agustus	32	4
September	34	1

Bulan	Penerapan e-Logbook (Kapal)	
	Verifikasi	Aktifasi
Oktober	22	1
November	26	-
Desember	43	-
Total	310	29

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon mengimplementasikan Logbook penangkapan ikan melalui aktivasi dan verifikasi yang dibarengi dengan himbauan kepada para nahkoda dan pemilik kapal perikanan untuk senantiasa mengisi dan melaporkan hasil tangkapannya secara teratur.

6.7.5. Lembar Awal (LA) dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) – LT/LTS

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan salah satu pelabuhan yang diberikan kewenangan dalam menerbitkan Lembar Awal (LA) dan SHTI (LT/LTS) atau yang disebut sebagai Otoritas Kompeten Lokal (OKL).

Dalam perkembangannya, Lembar Awal mengalami perubahan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dari dokumen penunjang kegiatan ekspor menjadi dokumen pendaratan yang mesti dimiliki oleh kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan. Perubahan ini menjadikan semua hasil tangkapan yang didaratkan harus dibekali dengan Lembar Awal. Dengan demikian, hasil tangkapan tersebut dapat terlindungi dari unsur penangkapan ilegal atau IUU fishing.

Jumlah Lembar Awal (LA) yang diterbitkan PPN Ambon selama tahun 2024 sebanyak 853 lembar, jumlah ini mengalami peningkatan yang tajam jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 130 lembar atau sebesar 656%. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan tuna (loin) dari nelayan-nelayan pancing tuna (hand line) yang tersebar di kota Ambon dan sekitarnya.

Peningkatan permintaan akan tuna loin muncul karena aktifitas ekspor langsung dari Ambon ke Vietnam oleh beberapa perusahaan perikanan yang ada di Pulau Ambon. Tuna yang diekspor negeri, harus didukung oleh dokumen ekspor Lembar Turunan Sederhana (LTS). Jumlah penerbitan Lembar awal dan SHTI di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Jumlah Lembar Awal (LA) SHTI yang Diterbitkan

No.	Bulan	LA (Lbr)	SHTI LTS (Lbr)
1	Januari	22	-
2	Februari	11	-
3	Maret	37	-
4	April	6	-
5	Mei	31	3
6	Juni	18	-
7	Juli	146	9
8	Agustus	36	-
9	September	221	5
10	Oktober	83	5
11	November	70	5
12	Desember	172	4
Jumlah		853	31

Tahun 2024, merupakan tahun pertama bagi PPN Ambon dalam menerbitkan Lembar Turunan Sederhana. Permintaan dokumen ini diterima PPN Ambon sejak bulan Mei dan berlangsung terus hingga Desember 2024. Dalam kurun waktu 8 bulan, PPN Ambon telah menerbitkan 31 dokumen LTS untuk 488,3 ton produk olahan tuna loin dalam bentuk beku (frozen).

6.7.6. Penangkapan Ikan Terukur mendukung PNBP SDA Pasca Produksi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dijelaskan bahwa penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (UPT KKP) dan sebagai sentra perikanan terbesar di Kota Ambon, Provinsi Maluku. PPN Ambon termasuk dalam Zona Penangkapan 03 yang meliputi WPP NRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), WPP NRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur) serta WPP NRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda) dengan alat tangkap dan sumberdaya ikan yang ditangkap pun juga beragam dan berbeda pada masing-masing WPP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman <https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pit/> yaitu Nilai PHP Pascaproduksi di Pelabuhan Perikanan, perolehan PNBP SDA di PPN Ambon belum memenuhi target sebesar Rp. 3.902.450.331, dengan realisasi sebesar Rp. 1.317.378.559 atau 33,76%. Hal ini dikarenakan jumlah kunjungan kapal dan volume produksi yang didaratkan sehingga berpengaruh pada nilai PHP pascaproduksi. Berikut nilai PHP PNBP Pascaproduksi di PPN Ambon selama tahun 2024.

Tabel 25. Realisasi PNBP SDA di PPN Ambon Tahun 2024

Uraian	Frekuensi Pendaratan	Volume Produksi (Kg)	Nilai PNBP (Rp.)
5% (Kapal ≤ 60 GT)	126	538.189	304.056.350
10% (Kapal > 60 GT)	15	225.665	1.013.322.209
Total	141	763.854	1.317.378.559
Realisasi			1.317.378.559
Target			3.902.450.331
Presentase (%)			33,76

Jumlah frekuensi kapal perikanan dengan skema pasca produksi yang melakukan aktivitas pembongkaran ikan di PPN Ambon sebanyak 141 kali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan kepada pelaku usaha perikanan tangkap yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pascaproduksi. Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh kepala pelabuhan perikanan berdasarkan formula, sebagai berikut :

Penghitungan PNBP Pascaproduksi (Rp.):
 = Indeks tarif X nilai produksi ikan pada saat didaratkan (Rp.)

Di mana, Indeks tarif sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 5% (lima persen) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*; dan
- 10% (sepuluh persen) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 60 (enam puluh) *gross tonnage*.

Realisasi pendapatan PNBP SDA Pasca produksi pada tahun 2024, di mana nilai PNBP SDA tertinggi pada bulan Desember 2024 dan terendah pada bulan Januari 2024. Realisasi pendapatan PNBP SDA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 26. Rincian Realisasi PNBP SDA di PPN Ambon per Bulan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Kapal yang Mendarakan (trip)	Jumlah Fisik Kapal yang Mendarakan (unit)	Volume Produksi (Kg)	Nilai PNBP SDA (Rp.)
Januari	3	2	3.511	1.763.135
Februari	7	3	40.538	18.721.125
Maret	14	8	100.233	268.713.627
April	2	2	26.083	151.454.502
Mei	8	6	83.573	140.541.680
Juni	11	7	57.334	68.191.155
Juli	12	6	57.196	27.950.825
Agustus	17	8	67.124	33.692.475
September	16	9	72.376	108.004.515
Oktober	9	8	49.583	92.725.805
November	13	8	54.233	28.902.125
Desember	29	15	152.070	376.717.590
Total	141	82	763.854	1.317.378.559

6.8. Pelayanan Perbekalan

6.8.1. Perbekalan Es

Untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan dan menjaga mutu hasil tangkapan nelayan, pada tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon kembali mengaktifkan operasional pabrik es yang sempat terhenti akibat kerusakan. Produksi es dimulai pada bulan maret tahun 2024 hingga Desember tahun 2024, dengan total penyaluran es sebanyak **7.451** balok atau **223.530** kg. Hasil produksi ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan es kapal perikanan, tetapi juga didistribusikan ke pasar ikan guna menjaga kualitas hasil perikanan.

Selain dari pabrik es milik Pelabuhan Perikanan Nusantara ambon, kebutuhan es untuk kapal-kapal yang beroperasi di PPN Ambon juga dipasok oleh perusahaan-perusahaan yang beraktifitas di kawasan pelabuhan yaitu Fa Sanu dengan kapasitas 5 ton/ hari, PT. Asmin Jumahir Sejahtera dengan kapasitas 5 ton/hari, milik PT. Harta Samudera dengan kapasitas 5 ton/ hari, dan juga bersumber dari pemasok yang

berada di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Rincian data penyaluran es pada tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 27. Volume Penyaluran Es Tahun 2024

No	Bulan	Volume Penyaluran Es (kg)		
		Dari dalam pelabuhan	Dari luar pelabuhan	Jumlah penyaluran
1	Januari	206.250	-	206.250
2	Februari	141.750	226.170	367.920
3	Maret	162.960	96.810	259.770
4	April	84.000	183.720	267.720
5	Mei	67.530	194.310	261.840
6	Juni	66.480	143.850	210.330
7	Juli	23.550	23.190	46.740
8	Agustus	17.250	13.320	30.570
9	September	66.750	217.710	284.460
10	Oktober	89.910	3.360	93.270
11	November	110.400	59.670	170.070
12	Desember	67.350	4.410	71.760
Jumlah		1.104.180	1.166.520	2.270.700

Volume penyaluran es ke kapal perikanan selama tahun 2024 tercatat sebesar 2.271 ton, mengalami penurunan sebesar 52,36% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 4.767 ton. Penyaluran es tersebut terdiri atas:

- a. Penyaluran dari dalam pelabuhan, yang bersumber dari pabrik es baik milik PPN Ambon maupun perusahaan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, dengan total penyaluran sebesar 1.104 ton (48,63%).
- b. Penyaluran dari luar pelabuhan, yang berasal dari pemasok es di luar kawasan pelabuhan, dengan total penyaluran sebesar 1.166 ton (51,37%).

Selama periode 2020–2024, volume penyaluran es mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 17. Grafik Penyaluran Es di PPN Ambon, Tahun 2020 - 2024

6.8.2. Penyaluran BBM

Dalam proses penyaluran BBM ke kapal-kapal perikanan maupun kapal non-perikanan yang berkunjung di PPN Ambon, tersedia satu unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan pelabuhan. Volume penyaluran BBM di PPN Ambon pada tahun 2024 yang berasal dari SPBN tersebut tercatat sebesar 113.962 liter untuk *Dexlite* dan 985.192 liter untuk *Solar*.

Selain dari SPBN di kawasan PPN Ambon, penyaluran BBM juga berasal dari luar kawasan pelabuhan dengan volume mencapai 2.049.598 liter, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

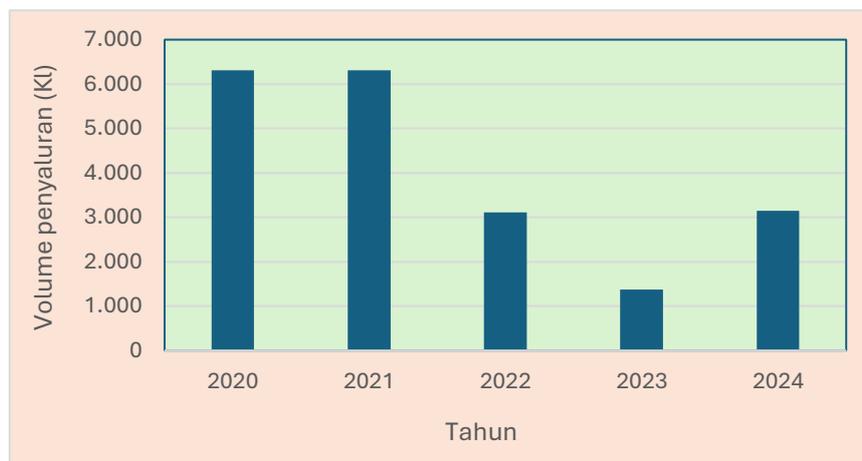
Tabel 28. Volume Penyaluran BBM Tahun 2024

No	Bulan	Volume Penyaluran BBM (Liter)				Jumlah penyaluran
		Dari dalam pelabuhan		Dari luar pelabuhan		
		Subsidi	Non Subsidi	Subsidi	Non Subsidi	
1	Januari	45.700	1.868		336.982	384.550
2	Februari	30.276	1.234		138.670	170.180
3	Maret	66.376	2.818		64.902	134.096
4	April	66.284	2.052		202.364	270.700
5	Mei	218.013	17.091		-71.454	163.650
6	Juni	265.292	13.501		38.670	317.463
7	Juli	211.082	11.490		203.988	426.560
8	Agustus	3.200	3.875		368.715	375.790
9	September	-	1.489		167.611	169.100
10	Oktober	25.766	48.532		14.587	88.885
11	November	29.573	5.634		537.617	572.824
12	Desember	23.630	4.368		46.802	74.800
Jumlah		985.192	113.952	0	2.049.454	3.148.598

Volume penyaluran BBM ke kapal perikanan selama tahun 2024 tercatat sebesar 3.149 kiloliter, mengalami kenaikan sebesar 129,85% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 1.370 kiloliter. Penyaluran BBM tersebut terdiri atas:

- a. Penyaluran dari dalam pelabuhan, yang bersumber dari SPBN, dengan total penyaluran sebesar 1.099.144 liter (34,91%), yang terdiri dari:
 - BBM subsidi sebesar 985.192 liter (89,63%)
 - BBM non subsidi sebesar 113.952 liter (10,37%)
- b. Penyaluran dari luar pelabuhan, yang berasal dari luar kawasan pelabuhan, dengan total penyaluran sebesar 2.049.454 liter (65,09%)

Selama periode 2020-2024, volume penyaluran BBM mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 18. Grafik Penyaluran BBM, Tahun 2020-2024

6.8.3. Penyaluran Air Bersih

Penyaluran air bersih di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon bersumber dari dua jalur, yaitu instalasi air bersih milik PPN Ambon dan mobil tanki air bersih yang berasal dari luar pelabuhan untuk disalurkan ke kapal-kapal.

Pada tahun 2024, penyaluran air bersih melalui instalasi PPN Ambon mencapai 1.595.875 liter, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan, unit pengolahan ikan, serta warung-warung yang beroperasi di kawasan pelabuhan. Rincian data penyaluran air bersih tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 29. Volume Penyaluran Air Bersih Tahun 2024

No	Bulan	Volume Penyaluran Air (Liter)		
		Dari dalam pelabuhan	Dari luar pelabuhan	Jumlah Penyaluran
1	Januari	6.875	0	6.875
2	Februari	73.000	105.800	178.800
3	Maret	100.000	72.400	172.400
4	April	55.000	127.000	182.000
5	Mei	40.000	78.400	118.400
6	Juni	70.000	103.500	173.500
7	Juli	145.000	147.600	292.600
8	Agustus	126.000	187.400	313.400
9	September	117.000	141.706	258.706
10	Oktober	417.000	134.300	551.300
11	November	392.000	277.600	669.600
12	Desember	54.000	191.000	245.000
Jumlah		1.595.875	1.566.706	3.162.581

Volume penyaluran air bersih selama tahun 2024 tercatat sebesar 3.163 kiloliter, mengalami kenaikan sebesar 144,44% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 1.294 kiloliter. Penyaluran air bersih tersebut terdiri atas:

- Penyaluran dari dalam pelabuhan, yang bersumber dari instalasi air bersih milik PPN Ambon, dengan total penyaluran sebesar 1.596 kiloliter (50,46%).
- Penyaluran dari luar pelabuhan, yang berasal dari pasokan air melalui mobil tanki, dengan total penyaluran sebesar 1.567 kiloliter (49,54%).

Selama periode 2020–2024, volume penyaluran air bersih mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 19. Grafik Penyaluran Air Bersih, Tahun 2020-2024

6.9. Sarana dan Prasarana Pelabuhan

Sarana dan prasarana yang juga dikenal sebagai fasilitas pelabuhan perikanan, menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, khususnya pada Pasal 4, menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari :
 - a. Fasilitas Pokok;
 - b. Fasilitas Fungsional; dan
 - c. Fasilitas Penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:
 - a. Penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin;
 - b. Dermaga;
 - c. Jetty;
 - d. Kolam Pelabuhan;
 - e. Alur pelayaran;
 - f. Jalan kompleks dan drainase; dan
 - g. Lahan.
- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:
 - a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI);
 - b. Menara Navigasi (Suar);
 - c. Fasilitas Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi Listrik;
 - d. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jarring;
 - e. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
 - f. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
 - g. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan;
 - h. Kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
 - i. Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:

- a. Balai pertemuan nelayan;
- b. Mess operator;
- c. *Guest house*;
- d. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;
- e. Pertokoan; dan
- f. Pos jaga.

Fasilitas Pokok merupakan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kepelabuhanan diantaranya sebagai tempat kegiatan berlabuh dan bertambat kapal perikanan. Fasilitas pokok juga dapat berfungsi untuk meminimalisir gangguan alam (pemecah gelombang) dan fungsi keselamatan pelayaran (alur pelayaran keluar masuk pelabuhan). Adapun fasilitas pokok di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 30. Fasilitas Pokok di PPN Ambon

No	Nama Fasilitas	Ukuran				Kondisi
		Panjang (m)	Lebar (m)	LWS (m)	Luas (m ²)	
1	Areal pelabuhan	0			35.000	Baik
2	Kolam Pelabuhan			>8	486.000	Baik
3	Dermaga	494	8			Baik
4	<i>Reveatment</i>	595				Baik
5	Groin					Baik
6	Jalan Kompleks		5 - 6		4.921	Baik
7	<i>Drainase</i>				1.317	Baik

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional Pelabuhan perikanan. Adapun fasilitas fungsional di PPN Ambon tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Fasilitas Fungsional di PPN Ambon

No	Nama Fasilitas	Luas (m ²)	Volume	Keterangan	Kondisi
1	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	527			Tidak berjalan
2	Menara Navigasi (Suar)		1	Lampu	Baik
			1	Menara suar	Baik
3	Komunikasi		1	Telepon	Baik
4	Fasilitas dan Instalasi Air		2	Sumur Artesis	Baik, namun debit air terbatas
			1	Sumur Bor	Baik
5	Instalasi BBM (kapasitas)		500	Ton	Rusak berat
6	Pabrik es		10	Ton/hari	Baik
7	Tower air		2	tower	Baik
8	Instalasi Listrik (kapasitas)	150	105	Kva	Baik
9	Generator set/ Genset		200	Kva	Baik
			175	Kva	Rusak Berat
10	<i>Slipway</i>	33			Rusak Berat
11	ABF (kapasitas)		20	Ton	Rusak Berat
	<i>Cold Storage</i> (kapasitas)		100	Ton	Rusak Ringan
12	Kantor Administrasi Pelabuhan	903			Baik
13	Kantor Syahbandar	117			Baik
14	Pagar Kawasan	1.302			
15	<i>Forklift</i>		1	Unit	Baik
16	Kendaraan Truk dan Minibus		1	Unit	Baik

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di Pelabuhan Perikanan. Secara tidak langsung, fasilitas penunjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan memberikan kemudahan/kelancaran dalam melaksanakan kegiatan aktivitas usahanya di Pelabuhan perikanan. Adapun fasilitas penunjang di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah.

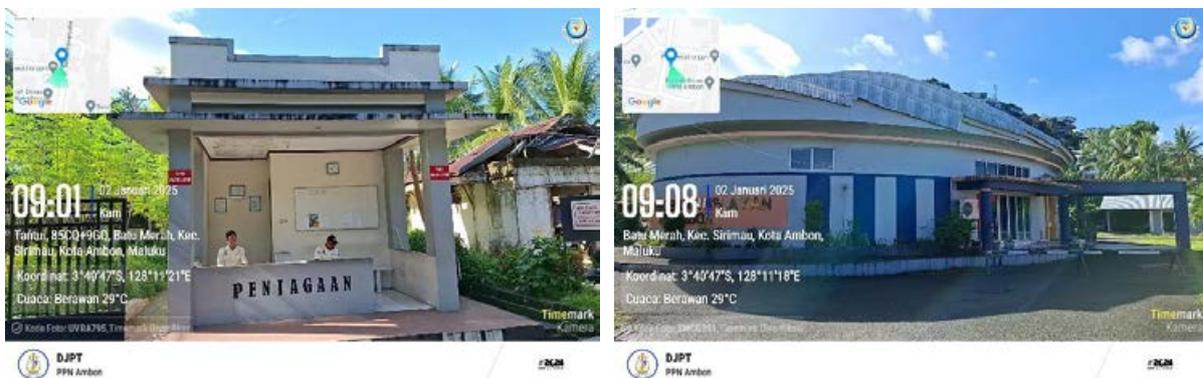
Tabel 32. Fasilitas Penunjang di PPN Ambon

No	Nama Fasilitas	Luas (m ²)	Volume	Kondisi
1	Balai Pertemuan Nelayan	1.257	1 Unit	Baik
2	Gedung Pelayanan Terpadu	300	1 Unit	Baik
3	Bangsai Pengolahan	79	1 Unit	Baik
4	Gedung K3	24	1 Unit	Baik
5	Rumah Dinas	906	13 Unit	Baik
6	Mess operator	19	2 Unit	Baik
7	<i>Guest House</i>	137	1 Unit	Baik
8	WC Umum	37	1 Unit	Rusak Berat
9	Garasi	40	4 Unit	Rusak ringan
		29		

No	Nama Fasilitas	Luas (m ²)	Volume	Kondisi
		91		
		22		
10	Pos jaga	42 19	2 Unit	Rusak ringan
11	Gudang arsip	64	1 Unit	Baik
12	Masjid	427	1 Unit	Baik
13	Kendaraan Dinas Operasional			
	- Roda 2		9 Unit	Rusak Ringan
			7 Unit	Baik
	- Roda 3		2 Unit	Baik
				Rusak Berat
	- Roda 4		2 Unit	Rusak Ringan
14	Kendaraan Fungsional		4 Unit	Rusak Ringan
			1 Unit	Rusak Berat
15	Gudang Barang Rusak Berat (Bangunan Tertutup Permanen)		1 Unit	Baik



Gambar 20. Gedung Perkantoran Adminitrasi dan Dermaga PPN Ambon



Gambar 21. Balai Pertemuan Nelayan dan Pos Jaga Keamanan

6.10. Penggunaan Lahan dan Fasilitas Pelabuhan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Ambon memiliki lahan industri seluas 35.308 m² yang telah dimanfaatkan dengan skema penggunaan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021. Namun, terjadi perubahan skema pemanfaatan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang menginstruksikan pelaksanaan pemanfaatan BMN menggunakan **cara sewa** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pada tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) permohonan perpanjangan perjanjian dan 1 (satu) permohonan baru. Perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 2024 berjumlah 3 (tiga), dengan 2 (dua) diantaranya merupakan permohonan yang diajukan dari tahun 2023. Dengan demikian, terdapat 7 permohonan yang telah diproses dan diajukan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, namun masih tertunda akibat proses penilaian ulang BMN oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hingga akhir tahun 2024, dari total luas lahan industri seluas 35.308 m², telah dimanfaatkan 35.068 m² atau 99,32%, yang terdiri atas penggunaan untuk bangunan pabrik es, unit pengolahan, kios, sewa lahan perbankan, dan koperasi. Adapun rincian penggunaan lahan di PPN Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 33. Penggunaan Lahan PPN Ambon Tahun 2024

No	Nama Barang	Luasan objek perjanjian (m ²)		Luas yang digunakan (m ²)	Keterangan penggunaan
		Tanah	Bangunan		
1	Fa. Sanu	1200	-	1200	Penggunaan Tanah Industri
2	PT. Tri Satria Samudra 01	1200	-	1200	Penggunaan Tanah Industri
3	PT. Tri Satria Samudra 02	400	-	400	Penggunaan Tanah /Bangunan Industri
4	PT. Sumber Laut Utama	700	-	700	Penggunaan Tanah Industri
5	PT. Samudera Pratama Jaya	160	-	160	Penggunaan Tanah Industri
6	PT. Intimas Surya	1600	-	1600	Penggunaan Tanah Industri
7	PT. Jaring Mas	2116	-	2116	Pemanfaatan Lahan/Bangunan Industri
8	CV. Advani Bintang Samudera	495	-	495	Penggunaan Tanah Industri
9	CV. Arbil	400	-	400	Penggunaan Tanah Industri
10	CV. Maluku Fortuna	300	-	300	Penggunaan Tanah Industri
11	Oei Eng San	400	-	400	Penggunaan Tanah Industri
12	PT. Mina Usaha Harapan	800	-	800	Penggunaan Tanah Industri
13	PT. Harta Samudra I	2500	-	2500	Penggunaan Tanah Industri
14	PT. Harta Samudra II	1200	-	1200	Penggunaan Tanah Industri
15	PT. Harta Samudra III	1617	-	1617	Penggunaan Tanah Industri
16	CV. Tuna Maluku	800	-	800	Penggunaan Tanah Industri
17	PT. Karya Laut Sejahtera	663	-	663	Penggunaan Tanah Industri
18	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang	752	-	752	Penggunaan Tanah Industri
19	Fatma Kamah	450	-	450	Penggunaan Tanah
20	KPT. Mina Sejahtera	752	-	752	Penggunaan Tanah Industri

No	Nama Barang	Luasan objek perjanjian (m2)		Luas yang digunakan (m2)	Keterangan penggunaan
		Tanah	Bangunan		
21	PT. Bank Tabungan Negara	8	8	16	Penggunaan Tanah dan Bangunan
22	CV. Harta Laut Cemerlang	139	130	269	Penggunaan Tanah dan Bangunan
23	PT. Asmin Jumahir Sejahtera	74	668	742	Penggunaan Tanah dan Bangunan
24	CV. Dian Samudra	-	350	350	Penggunaan Bangunan

6.11. Investasi dan Peredaran Uang

Investasi di pelabuhan perikanan berasal dari instansi pemerintah maupun pihak swasta. Investasi dapat berupa modal tetap/tidak bergerak seperti bangunan, dan modal bergerak seperti biaya produksi.

Tabel 34. Investasi di Kawasan PPN Ambon

No.	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Jenis Usaha	Nilai Investasi (Rp)
1	Fa. Sanu	Tempat Pengolahan Ikan, Pabrik Es dan <i>Cold Storage</i>	3.000.000.000
2	PT. Tri Satria Samudra 01	Pengumpulan dan Pemasaran Ikan, Perbengkelan	11.000.000.000
3	PT. Tri Satria Samudra 02	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	150.000.000
4	PT. Sumber Laut Utama	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	9.000.000.000
5	PT. Samudera Pratama Jaya	Jasa Perbengkelan	400.000.000
6	PT. Inti Mas Surya	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5.500.000.000
7	PT. Jaring Mas	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan dan Gudang	15.000.000.000
8	CV. Adfani Bintang Samudera	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	2.150.000.000
9	CV. Arbil	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	3.000.000.000
10	CV. Maluku Fortuna	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	2.000.000.000
11	Oei Eng San	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan serta Produksi dan Penyaluran Es	2.500.000.000
12	PT. Mina Usaha Harapan	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	4.025.000.000
13	PT. Harta Samudra 01	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	23.900.000.000
14	PT. Harta Samudra 02	Ruang prosesing, Gudang ikan, pabrik es	7.000.000.000
15	PT. Harta Samudra	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan dan kantor	3.500.000.000
16	CV. Tuna Maluku	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	4.000.000.000
17	PT. Karya Laut Sejahtera	Penyaluran BBM	3.500.000.000
18	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	2.500.000.000
19	Fatma Kamah	Kafetaria	700.000.000

No.	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Jenis Usaha	Nilai Investasi (Rp)
20	KPT. Mina Sejahtera	penjualan sembako (kios sembako)	645.000.000
21	PT. Bank Tabungan Negara	Jasa Keuangan (ATM)	50.000.000
22	CV. Harta Laut Cemerlang	Pengumpulan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan	1.500.000.000
23	PT. Asmin Jumahir Sejahtera	Unit Pengolahan Ikan dan Pabrik Es	4.100.000.000
24	CV. Dian Samudra	Cold Storage dan Air Blast Freezer	2.500.000.000
25	Kios Ibu Tini Maka	Warung Makan	20.000.000
26	Kios Rani	Toko Kelontong	20.000.000
27	Kios Indah Maros	Toko Kelontong	20.000.000
28	Warung Buah	Toko Kelontong	20.000.000
29	Kios Air Isi Ulang	Toko Kelontong	20.000.000
30	Warung Coto Makasar	Warung Makan	20.000.000
31	Warung Pak Karim	Warung Makan	20.000.000
32	Warung Mama Ris	Warung Makan	10.000.000
33	Warung Sari Nurlita	Warung Makan	20.000.000
Total			111.790.000.000

Peredaran uang di kawasan PPN Ambon pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp123.932.295.215, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp75.943.033.245, yang menunjukkan kenaikan sebesar Rp47.989.261.970, atau meningkat 63,19% dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan aktifitas kapal yang berdampak pada naiknya penyaluran BBM, penyaluran air bersih, tenaga kerja (nelayan), dan terutama nilai produksi ikan. Adapun rincian jumlah uang beredar di kawasan PPN Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Peredaran Uang di PPN Ambon Tahun 2024

No	Indikator	Peredaran Uang (Rp)
1	Penyaluran BBM	23.105.063.300
2	Penyaluran Air Bersih	175.190.600
3	Penyaluran Es	1.054.660.000
4	Jasa Angkutan	
5	Jasa Bongkar Muat	
6	Warung Pujasera	7.000.000
7	Keamanan	47.460.000
8	Pengelola TPI	
9	Pedagang Ikan	
10	Tenaga Kerja (Nelayan)	18.193.310.000
11	Nilai Produksi Ikan	76.494.305.750
12	Pengolahan Produk Beku	1.900.500.000
13	PNBP	1.524.800.565
14	KPT Mina Sejahtera	1.430.005.000
Jumlah		123.932.295.215

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai peredaran uang di PPN Ambon mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 36. Peredaran Uang di PPN Ambon Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Peredaran Uang (Rp1.000,-)	Per bulan (Rp)	Per hari (Rp)
1	2020	85.046.774	5.134.713	165.636
2	2021	97.722.196	7.087.231	228.620
3	2022	134.193.463	11.182.786	367.653
4	2023	75.943.033	6.328.586	204.148
5	2024	123.932.295	10.327.691	344.256
Jumlah		516.837.761	40.061.007	1.310.313

6.12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA

Landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penarikan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di PPN Ambon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pungutan PNBP yang telah dilaksanakan di PPN Ambon tahun 2024 yaitu:

1. Pelayanan jasa pas masuk;
2. Pelayanan tambat labuh kapal;
3. Pelayanan jasa kebersihan pelabuhan;
4. Pelayanan jasa pengadaan es;
5. Pelayanan jasa penggunaan *Freezer* dan *Cold Storage*;
6. Pelayanan jasa listrik;
7. Pelayanan jasa penggunaan kendaraan dan;
8. Pelayanan jasa sewa tanah dan bangunan.

Adapun data hasil pelaksanaan pungutan PNBP selama tahun 2024 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Hasil Pungutan PNBP Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
		Target	Capaian
I	PENERIMAAN UMUM		
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		-
	Pemanfaatan Rumah Negara		33.416.304
	Penerimaan kembali belanja Pegawai tahun Anggaran yang lalu		553.300
	Pendapatan Lainnya		-

No	Jenis Penerimaan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
		Target	Capaian
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		3.344.580
	Jumlah Penerimaan Umum		37.314.184
II	PENERIMAAN FUNGSIONAL		
a	Pelabuhan Perikanan		
	<i>Tambat Kapal Perikanan</i>		
	Kapal >100 GT	17.375.000	76.024.460
	Kapal >30 GT - 100 GT	18.118.000	21.039.569
	Kapal >5 GT - 30 GT	71.372.000	86.133.480
	Kapal Asing	8.605.000	8.883.650
	<i>Labuh Kapal Perikanan</i>		-
	Kapal >100 GT		-
	Kapal >30 GT - 100 GT		-
	Kapal >5 GT - 30 GT		-
	<i>Tambat/Labuh Kapal Non Perikanan</i>		-
	Kapal Non Perikanan Penunjang Kapal Perikanan		-
	Kapal Non Perikanan Non Penunjang Kapal Perikanan	115.030.000	361.945.000
	<i>Jasa Pengadaan air</i>		-
	Pengadaan air	123.654.000	66.412.000
	<i>Jasa Pas Masuk</i>		-
	Kendaraan Golongan I (R2/R3)	78.500.000	78.482.600
	Kendaraan Golongan II (R4)	72.600.000	57.612.000
	Kendaraan Golongan III (R6)	16.000.000	19.290.000
	Kendaraan Golongan IV (R10)	300.000	1.155.000
	Kendaraan Golongan V (>R10)		-
	<i>Jasa Kebersihan Pelabuhan</i>		-
	Bangunan Permanen Tertutup	49.000.000	43.738.520
	Perkantoran/pertokoan		-
	Rumah Makan/Kios	10.900.000	9.750.000
	Kapal Perikanan >5 GT	19.000.000	22.536.290
	Kapal Non Perikanan	5.000.000	36.194.500
b	Penggunaan Sarana dan Prasarana		-
	<i>Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan</i>		-
	Pengembangan (Development Charge)	167.684.000	145.792.000
	Pemeliharaan Prasarana	8.020.000	40.575.000
	Tempat Penumpukan Barang	2.800.000	5.620.000
	Bangunan Permanen	8.100.000	17.340.000
	Mess		-
	Ruang Rapat		-
	Gedung Pertemuan	112.500.000	-
	<i>Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin</i>		-
	Pengadaan Es	112.500.000	232.847.670
	Pembekuan (freezer)		-

No	Jenis Penerimaan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
		Target	Capaian
	Gudang Beku (Cold Storage)	96.005.000	47.939.593
	<i>Jasa Penggunaan Kendaraan</i>		-
	Fork Lift		1.500.000
	dump truck		300.000
	Truck Boks		400.000
c	Pelabuhan Perikanan (Batang Tubuh)		-
	<i>Listrik</i>		-
	Pemakaian Listrik	5.170.000	13.920.816
	Total Penerimaan Umum dan Fungsional	1.118.233.000	1.432.746.332
	Persentase Capaian		128%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasi PNBPN pada tahun 2024 mencapai **Rp1.432.746.332**, dengan persentase realisasi sebesar **128%** dari target yang ditetapkan, yaitu **Rp1.118.233.000**. Namun, terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2023, di mana PNBPN Non SDA mencapai **303%** dari target Rp922.911.000, dengan realisasi sebesar Rp2.792.119.691.

Penurunan ini dipengaruhi oleh terbitnya Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024, yang mengatur perubahan skema penggunaan tanah dan bangunan. Semula, pengenaan tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, kemudian diubah menjadi skema pemanfaatan dengan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam proses perpanjangan sewa, terjadi kendala pada penilaian aset oleh KPKNL yang menyebabkan beberapa permohonan perpanjangan tertunda. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan penerimaan PNBPN di tahun 2024. Adapun rincian realisasi PNBPN per bulan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Realisasi PNBPN per Bulan Tahun 2024

No	Bulan	Penerimaan		Realisasi Perbulan (Rp)	Realisasi s/d Bulan (Rp)	Capaian (%)
		Fungsional (Rp)	Umum (Rp)			
1	Januari	148.157.289	3.843.112	152.000.401	152.000.401	13,6
2	Februari	46.777.387	2.923.668	49.701.055	201.701.456	18,0
3	Maret	84.789.295	2.923.668	87.712.963	289.414.419	25,9
4	April	161.575.000	2.923.668	164.498.668	453.913.087	40,6
5	Mei	91.823.403	2.669.436	94.492.839	548.405.926	49,0

6	Juni	55.455.115	2.669.436	58.124.551	606.530.477	54,2
7	Juli	82.932.849	2.669.436	85.602.285	692.132.762	61,9
8	Agustus	73.218.602	2.669.436	75.888.038	768.020.800	68,7
9	September	128.470.477	2.669.436	131.139.913	899.160.713	80,4
10	Oktober	210.027.179	2.669.436	212.696.615	1.111.857.328	99,4
11	November	196.158.042	6.014.016	202.172.058	1.314.029.386	117,5
12	Desember	116.047.510	2.669.436	118.716.946	1.432.746.332	128,1
Total		1.395.432.148	37.314.184	1.432.746.332	8.469.913.087	128

6.13. Penyerapan Tenaga Kerja

Keberadaan PPN Ambon di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon diharapkan dapat memberikan efek ganda (*multifier effects*) terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah ini, baik dalam kegiatan ekonomi yang bersifat agrobisnis perikanan maupun kegiatan dibidang usaha lainnya sehingga dapat menambah lapangan kerja dan membuka kesempatan berusaha.

Tenaga kerja di PPN Ambon melibatkan seluruh nelayan (ABK) kapal perikanan, karyawan perusahaan perikanan, serta pekerja perorangan yang bergerak di bidang pengolahan, pengumpulan, pemasaran, dan pelayanan jasa yang memanfaatkan lahan pelabuhan sebagai lokasi usaha. Selain itu, tenaga kerja juga mencakup pegawai instansi pemerintah, baik pegawai PPN Ambon maupun instansi terkait lainnya yang berada di lingkungan pelabuhan. Rincian tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2024

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
I	Nelayan	6.531
II	Non Nelayan	4.030
	Tukang dan buruh	680
	Pegawai perusahaan dan instansi terkait	2.400
	Pegawai Pelabuhan	102
	Lainnya	848
Jumlah (Orang)		10.561

Penyerapan tenaga kerja di PPN Ambon selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 12.251 orang, sedangkan penyerapan terendah terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 10.561 orang. Dibandingkan

dengan tahun 2023, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,82%. Adapun rincian penyerapan tenaga kerja selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 40. Penyerapan Tenaga Kerja Periode Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Jumlah	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nelayan (Fisherman)	29.347	7.895	4.593	5.572	4.756	6.531
2	Non Nelayan (Non Fisherman)	26.365	2.941	6.046	5.853	7.495	4.030
	Tukang dan buruh (Labor)	5.074	240	1.420	1.640	1.094	680
	Pegawai perusahaan dan instansi terkait (Ltd, etc)	16.756	2.299	2.353	3.784	5.920	2.400
	Pegawai pelabuhan (Official)	440	90	83	83	82	102
	Lainnya (Others)	4.095	312	2.190	346	399	848
Jumlah		55.712	10.836	10.639	11.425	12.251	10.561

6.14. Kegiatan Pendanaan Usaha Nelayan

Salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan melaksanakan kegiatan fasilitasi pendanaan usaha nelayan melalui pojok pendanaan nelayan di Pelabuhan-pelabuhan perikanan termasuk di PPN Ambon. Program ini akan diajukan oleh fasilitator ke Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) yang melakukan penyaluran dana bergulir yang berdampingan. Melalui program ini, diharapkan agar informasi serta akses terhadap pendampingan pendanaan usaha bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya semakin mudah untuk diperoleh.

Pojok pendanaan nelayan PPN Ambon ditahun 2024, lebih memfokuskan pelayanan pendanaan di dalam kawasan pelabuhan dengan cara memberikan informasi terkait pendanaan kepada para pengguna jasa yang belum mengetahui ataupun ingin mendapatkan informasi lebih terkait hal ini. Jumlah pengguna jasa / nelayan yang terlayani di tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan sebagian besar kebutuhan usaha yang dijalankan baik oleh pengguna jasa maupun nelayan dalam kawasan PPN Ambon, telah terpenuhi pendanaannya.



Gambar 22. Penyampaian Informasi Pendanaan Usaha

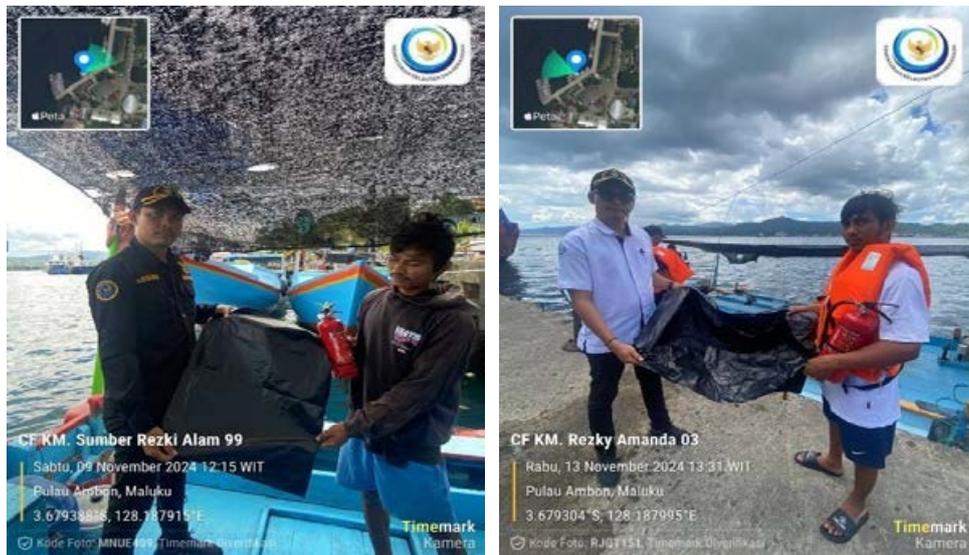
6.15. Kegiatan K-5 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Kerja)

Pelaksanaan kegiatan K-5 di PPN Ambon merupakan faktor yang turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan di pelabuhan perikanan tersebut. Dengan kondisi lingkungan pelabuhan perikanan yang terpelihara oleh kondisi K-5 nya dengan baik, suasana kondusif dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang beraktivitas di PPN Ambon.



Gambar 23. Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Kerja

Oleh sebab itu, PPN Ambon senantiasa memperhatikan kondisi kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan keselamatan kerja (K-5) di dalam areal pelabuhan. Selain menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan keselamatan kerja (K-5) di kawasan pelabuhan, PPN Ambon juga menghimbau dan mengumpulkan sampah dari kapal yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.



Gambar 24. Penyerahan Kantong Sampah kepada Awak Kapal



Gambar 25. Pemungutan Sampah di Kolam Pelabuhan

Tabel 41. Data Pengumpulan Sampah dari Kapal

No	Bulan/Tahun	Data Sampah (Kg)	
		Plastik	Non Plastik
1	Januari	207,6	269,1
2	Februari	159,2	220
3	Maret	140,3	382,1
4	April	102	385
5	Mei	85	454
6	Juni	146	508
7	Juli	115	434
8	Agustus	31,6	78,4
9	September	26,3	48,7
10	Oktober	34	93
11	November	19,1	36,9
12	Desember	104	380
Jumlah		1.124,7	3.203,6

Kegiatan ini merupakan capaian dari IKU pelabuhan yaitu pada indikator Nilai pengendalian lingkungan di PPN Ambon, di mana terdapat kegiatan yang mendukung nilai tersebut yakni pengelolaan kebersihan yang selalu dilaporkan melalui aplikasi Selaraskan KKP, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 26. Tampilan Aplikasi SELARASKAN KKP

Pada tahun 2024, score nilai pengendalian lingkungan berdasarkan aplikasi SELARASKAN untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tercatat sebesar 77,65 dengan predikat **BAIK**, melewati target yang ditetapkan sebesar 30,1. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

NO	NAMA PELABUHAN	SKOR KUMULATIF				TOTAL	RATA-RATA	KETERANGAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	PPN Sibolga	295.48	297.560	284.950	287.953	1165.92	97.16	SANGAT BAIK
2	PPS Cilacap	271.39	298.410	284.170	282.008	1135.98	94.66	SANGAT BAIK
3	PPN Prigi	270.66	291.690	279.860	289.184	1131.39	94.28	SANGAT BAIK
4	PPN Kejawanan	286.66	292.870	274.610	277.092	1131.23	94.27	SANGAT BAIK
5	PPN Pengambang	279	291.480	259.580	277.848	1107.91	92.33	SANGAT BAIK
6	PPN Pemangkat	287.04	294.270	272.580	247.538	1101.43	91.79	SANGAT BAIK
7	PPN Palabuhanratu	271.96	290.570	271.470	263.365	1097.36	91.45	SANGAT BAIK
8	PPN Ternate	261.87	276.030	252.180	252.781	1042.86	86.91	SANGAT BAIK
9	PPS Bungus	236.79	269.330	240.660	271.661	1018.44	84.87	SANGAT BAIK
10	PPN Kwardang	269.62	288.180	213.250	243.778	1014.83	84.57	SANGAT BAIK
11	PPP Teluk Batang	231.21	286.090	228.770	261.375	1007.44	83.95	SANGAT BAIK
12	PPN Brondone	227.34	259.440	214.330	243.889	945.00	78.75	BAIK
13	PPN Ambon	241.88	224.570	221.710	243.630	931.79	77.65	BAIK
14	PPN Sungeiliet	268.72	282.170	164.850	215.915	931.66	77.64	BAIK
15	PPN Pekalongan	158.78	236.700	260.770	270.884	927.13	77.26	BAIK
16	PPS Nizam Zochman Jakarta	102.69	276.470	260.070	269.834	909.06	75.76	BAIK
17	PPS Kendari	104.6	174.890	272.580	281.350	833.42	69.45	BAIK
18	PPN Karangentu	240	231.410	176.220	172.205	819.84	68.32	BAIK
19	PPS Belawan	96.6	221.890	245.310	247.231	811.03	67.59	BAIK
20	PPS Bitung	212	255.450	127.360	201.073	795.88	66.32	BAIK
21	PPN Tual	224.7	199.360	191.260	164.021	779.34	64.95	BAIK
22	PPN Tanjung Pandan	200.09	172.410	160.830	199.739	733.07	61.09	BAIK

Gambar 27. Hasil Implementasi SELARASKAN KKP Tahun 2024



PELAKSANAAN KEGIATAN/ PROGRAM



BAB VII. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Program pengelolaan perikanan tangkap terdiri dari empat kegiatan yaitu pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, pengelolaan kepelabuhanan perikanan, pengelolaan perizinan dan kenelayanan, serta pengelolaan sumber daya ikan. Pelaksanaan program pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon pada tahun 2024 diwujudkan melalui serangkaian kegiatan terstruktur yang telah dirancang dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga sebagai bagian integral dari dukungan terhadap kebijakan strategis Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT), khususnya dalam implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

7.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Kegiatan Non Fisik)

7.1.1. Sosialisasi Pemanfaatan BMN Cara Sewa di Pelabuhan Perikanan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan PPN Ambon pada tanggal 13 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder, nelayan, dan pelaku usaha industri perikanan mengenai alur dan prosedur penggunaan serta pemanfaatan fasilitas di PPN Ambon serta menjelaskan hak, kewajiban, dan peraturan yang berlaku terkait penggunaan fasilitas tersebut.



Gambar 28. Sosialisasi Pemanfaatan BMN Cara Sewa di Pelabuhan Perikanan

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari *stakeholder* dan pelaku usaha industri perikanan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala PPN Ambon, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi secara panel oleh narasumber. Adapun narasumber dan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Ricardo A. Siringoringo - Ketua Tim Kerja TKPU: Penerapan pemanfaatan BMN cara sewa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.
- Ratna Ariyani - Pengelola BMN: Optimalisasi Barang Milik Negara.
- Mizwar - AP3T Terampil: Alur prosedur pemanfaatan Barang Milik Negara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, dan semua pertanyaan dijawab oleh narasumber dengan jelas dan sesuai dengan isi materi. Penjelasan tambahan juga diberikan untuk melengkapi pemahaman peserta.

7.1.2. Pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 715

Pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 715 dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 September 2024 di Hotel Aston Gorontalo, Provinsi Gorontalo bersama dengan LPP WPPNRI 716. Pertemuan didukung oleh Global Environmental Facility: *Coastal Fisheries Initiative – Indonesia Child Projecy* (GEF 6-CFI EAFM). Pertemuan ini bertujuan untuk menyiapkan bahan terkait isu, permasalahan dan rencana aksi sebagaimana berdasarkan hasil pertemuan updating data status sumber daya ikan dan lingkungan dalam rangka review Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 715 dan WPPNRI 717 (23 – 26 Juli 2024). Pertemuan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo dan juga sebagai Pj. Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Ibu Hj. Ir. Sila N. Botutihe, M.Si. Adapun peserta yang hadir baik secara *offline* maupun *online* sebanyak 58 peserta terdiri dari peserta *offline* sebanyak 36 orang dan peserta *online* sebanyak 22 orang. Peserta dikelompokkan kedalam 2 panel yaitu Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif. Narasumber dan materi yang disampaikan yaitu:

- Presentasi Hari Pertama:
 - Ferry Sutyan: Ketua Pokja PSDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI WPPNRI Perairan Laut Direktorat

Pengelolaan Sumber Daya Ikan, menyampaikan kebijakan penguatan LPP WPPNRI 715 dalam mendukung implementasi penangkapan ikan terukur.

- Aris Budiarto, S.Pi, M.Si: Ketua Tim Kerja Log Book dan Alokasi Kuota, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, menyampaikan materi tentang sosialisasi penghitungan kuota penangkapan ikan.
- Ady Chandra, M.Si: Koordinator Eksekutif LPP WPP NRI 716 dan Kepala PPS Bitung, menyampaikan materi tentang evaluasi RPP WPPNRI 716.
- Jafar Sahubauwa, S.St.Pi: Koordinator Eksekutif LPP WPP NRI 715 dan Kepala PPN Ambon, menyampaikan materi tentang monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi RPP WPPNRI 715.
- Presentasi Hari Kedua:
 - Irham Hi. Ichsan: Komisi Panel Ilmiah LPP WPPNRI 715/Komnas KAJISKAN, menyampaikan materi tentang dinamika pengelolaan perikanan serta isu dan permasalahan terkini di WPPNRI 715.
 - Johnny Budiman: Komisi Panel Ilmiah LPP WPPNRI 716/Komnas KAJISKAN, menyampaikan kondisi stok ikan pelagis kecil dan ikan karang-demersal di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, WPP NRI 716.

Selama pertemuan, terdapat lima topik yang dibahas oleh setiap panel melalui diskusi kelompok terfokus, terdiri dari:

1. Penangkapan Ikan Terukur: Sosialisasi cara perhitungan kuota dan pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);
2. Dinamika pengelolaan perikanan serta isu dan permasalahan terkini di WPPNRI 715 dan 716;
3. Progres operasionalisasi LPP WPPNRI 715 dan 716;
4. Kebijakan penguatan LPP WPPNRI 715 dan 716 dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
5. Updating data dalam rangka review RPP WPPNRI 715 dan 716.

Berdasarkan hasil pertemuan LPP WPPNRI 715 dan 716 disimpulkan bahwa penerapan azas keterwakilan dalam LPP WPPNRI, dapat merekam dan mendiskusikan aspirasi para pemangku kepentingan dengan baik dan dirumuskan suatu naskah kesepakatan bersama terkait dengan pengelolaan perikanan di WPP NRI terkait dengan isu permasalahan, kendala dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di WPPNRI 715.

Hal ini diharapkan akan mendukung upaya penguatan LPP WPPNRI dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 29. Pertemuan LPP WPPNRI 715

7.1.3. Sosialisasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) di Pelabuhan Perikanan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan PPN Ambon pada tanggal 25 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha industri perikanan serta pemilik atau pengurus kapal perikanan agar dapat:

- Mengendalikan dampak pencemaran yang timbul dari kegiatan ekonomi dan produksi di pelabuhan perikanan.

- Memastikan efektivitas serta mendukung implementasi konsep *bluefishing port*.
- Meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan.
- Mempermudah pengendalian, monitoring, dan evaluasi hasil pengukuran pencemaran air serta udara.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang mewakili Kepala PPN Ambon, dan dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari pengusaha industri perikanan serta pemilik atau pengurus kapal perikanan. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi secara panel oleh narasumber. Adapun narasumber dan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Ricardo A. Siringoringo, Ketua Tim Kerja TKPU, menyampaikan materi tentang Implementasi SELARASKAN di PPN Ambon.
- Ramli Makkawaru, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, membawakan materi mengenai Manifest Sampah Laut di PPN Ambon.
- Riansani Siauta, AP3T Pemula, memberikan materi tentang Identifikasi dan Sistem Penilaian Program SELARASKAN di PPN Ambon.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan,



Gambar 30. Sosialisasi SELARASKAN di Pelabuhan Perikanan

dan semua pertanyaan dijawab oleh narasumber dengan jelas dan sesuai dengan isi materi. Penjelasan tambahan juga diberikan untuk melengkapi pemahaman peserta.

7.1.4. Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Hasil Tangkapan Ikan Melalui Log Book

Kegiatan dilaksanakan di Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 21 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya pencatatan hasil tangkapan ikan dan kemampuan nelayan dalam mengisi dan menggunakan logbook elektronik (*e-logbook*) berbasis android. Target pelaksanaan kegiatan ini adalah nelayan yang melakukan operasi penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 715 (Laut Maluku dan Laut Seram). Kegiatan ini diikuti oleh 42 peserta dari Desa Pasanea dan sekitarnya dalam wilayah Kecamatan Seram Utara yang terdiri dari nahkoda, awak kapal perikanan, pemilik kapal, dan penyuluh perikanan. Kegiatan ini didanai oleh hibah *GEF 6 The CFI Indonesia Child Project: The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia*.



Gambar 31. Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Hasil Tangkapan Ikan Melalui Log Book

Kegiatan ini diisi dengan registrasi peserta, pembukaan oleh kepala Gugus Pulau III Seram Utara, penyampaian materi oleh narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui perwakilan Gugus Pulau III Seram Utara,

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, dan penyuluh perikanan Maluku Tengah. Materi yang disampaikan meliputi peran logbook sebagai dokumen pelengkap ekspor produk perikanan, verifikasi data logbook yang disederhanakan, penerapan logbook elektronik, dan pengoperasian logbook elektronik melalui gawai.

Setelah penyampaian materi, diadakan sesi tanya jawab di mana nelayan menyadari pentingnya pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan. Mereka juga mendapatkan penjelasan tentang cara mengisi form logbook dan pengumpulan laporan. Pada akhir sesi, diperkenalkan logbook elektronik yang memudahkan pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan secara digital.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dengan harapan agar nelayan dapat menindaklanjuti pencatatan dan pelaporan data hasil tangkapan ikan sebagai bentuk perubahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan data hasil tangkapan ikan.

7.1.5. Sosialisasi dan Gerai Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 Oktober 2024 di PT. Bina Nelayan Jaya, kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan dibiayai oleh GEF-6 *the CFI Indonesia Child Project: The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia for component A, B, and D*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung kepada pelaku usaha dan nahkoda kapal mengenai proses pengajuan SKKP dan memberikan kemudahan pada pelaku usaha dalam menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Target pelaksanaan kegiatan ini adalah pemilik kapal, pengurus kapal dan nahkoda kapal yang akan memperpanjang Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai perusahaan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kabid Kelautan dan Perikanan Bapak Samuel Kondjol yang mewakili Kadis Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya. Penyampaian materi oleh:

- a. Samuel Kondjol dari Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, membahas Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong.



Gambar 32. Sosialisasi dan Gerai Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)

- b. Hendry Pattiruhu S. H dari BASARNAS, membahas kebijakan pencarian dan pertolongan di bidang sistem komunikasi dan keselamatan pelayaran.
- c. Nasrun dari BASARNAS, memberikan pengantar tentang pertolongan di air.
- d. Rusdi Hamzah dari KAPI, membahas Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP).
- e. Rahajeng Cahya Ratri, S.Pi dari PPN Ambon, membahas monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan SKKP serta tutorial pengajuan permohonan melalui kapal.kkp.go.id/sicefi.

Peserta terlibat dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan terkait proses sertifikasi serta persyaratan dokumen. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. Setelah sosialisasi, dilakukan gerai pelayanan untuk membantu proses aplikasi SKKP. Hingga penutupan gerai, sebanyak 68 sertifikat telah diterbitkan.

7.1.6. Forum Konsultasi Pelayanan Publik

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 di Balai Pertemuan Nelayan PPN Ambon. Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Pelayanan Publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon adalah menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2023 terkait evaluasi kinerja pelayanan publik, memantau progres perbaikan SOP layanan oleh unit penyelenggara, mengidentifikasi risiko dari hasil survei kepuasan masyarakat terendah pada layanan selama 2023-2024, serta memonitor tindak lanjut permasalahan dalam Forum Konsultasi Pelayanan Publik dan data survei kepuasan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi pemerintah pusat (UPT KKP) dan daerah, perusahaan perikanan, akademisi, dan LSM.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kepala PPN Ambon, diikuti dengan penyampaian materi oleh narasumber dalam sesi panel. Ramli Makkawaru, selaku Ketua Tim Kerja (Katimja) Kesyahbandaran PPN Ambon, membawakan materi tentang layanan kesyahbandaran. Selanjutnya, Batih S.C. Hareva, sebagai penanggung jawab jasa pas masuk, menyampaikan materi mengenai layanan pas masuk. Sementara itu, Hardin Susanto, anggota evaluator SKM PPN Ambon, memberikan paparan terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam diskusi tersebut, telah diidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelayanan, serta dirumuskan rekomendasi perbaikan dan jangka waktu penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 42. Hasil Keputusan Bersama pada Forum Konsultasi Publik

No.	Identifikasi masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Jangka waktu 30 Menit dalam Pelayanan Penerbitan STBLK keberangkatan dan persetujuan berlayar dianggap terlalu lama	PPN Ambon akan melakukan evaluasi terhadap waktu penerbitan STBLK Keberangkatan secara maksimal	30 hari kerja
2.	Belum adanya sarana sistem antrian digital pada ruang pelayanan	PPN Ambon akan upayakan untuk segera menyediakan sarana sistem antrian digital di Ruang Pelayanan Terpadu	Triwulan ke II tahun 2025
3.	Belum tersedia rambu penunjuk arah masuk dan keluar kendaraan pada masuk gerbang	PPN Ambon akan upayakan pemasangan rambu penunjuk arah masuk dan keluar kendaraan pada pintu masuk gerbang	30 hari kerja

Hasil Forum Konsultasi Pelayanan Publik menghasilkan keputusan bersama untuk menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, dan jangka waktu penyelesaiannya sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan serta



Gambar 33. Forum Konsultasi Pelayanan Publik Tahun 2024

kepuasan publik. PPN Ambon berkomitmen menindaklanjuti usulan rekomendasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sementara peserta yang hadir akan turut memantau dan mengawasi progres tindak lanjut yang dilakukan.

7.1.7. Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN)

Kapal perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan awak kapal perikanan di kapal perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayaran, perlindungan kerja bagi awak kapal perikanan, serta pengangkutan ikan.

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi awak kapal perikanan dari segi kompetensi yaitu melalui kegiatan sertifikasi kompetensi kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Adapun kompetensi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan, keamanan dan keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, serta keamanan pangan dan jaminan mutu ikan hasil tangkapan.

Untuk mendukung sertifikasi kecakapan nelayan, PPN Ambon memiliki tiga instruktur yang berkualifikasi dan berkompeten dalam melatih serta memberikan materi pada kegiatan Bimtek SKN. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi nelayan kecil dan awak kapal perikanan, mencakup pemahaman dasar tentang operasi penangkapan ikan, pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja saat melaut sesuai dengan amanat Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

Sepanjang tahun 2024, instruktur PPN Ambon telah melatih nelayan kecil dan awak kapal perikanan di berbagai lokasi baik di pelabuhan perikanan maupun sentra nelayan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintahan daerah maupun LSM seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 43. Pelaksanaan Bimtek SKN Tahun 2024

No.	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Peserta Tersertifikasi
1.	Aspirasi DPR Komisi IV	Dusun Tihulesi, Desa Ureng, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah	09 – 10 Februari 2024	83	83
2.	Dinas Perikanan Kabupaten Buru	Kota Namlea, Kab. Buru	26 – 27 Februari 2024	83	83
3.	MDPI	Desa Wailihang, Kec. Waplau, Kab. Buru	28 – 29 Februari	59	59
4.	IPNLF	Dusun Waeyoho, Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat	4 – 5 Maret 2024	85	85
5.	PPN Ambon	Desa Pelauw, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah	05 – 06 Desember 2024	30	30



Gambar 34. Bimtek SKN di Namlea, Kab. Buru



Gambar 35. Bimtek SKN di Dusun Waeyoho, Desa Kawa, Kab. Seram Bagian Barat



Gambar 36. Bimtek SKN di Desa Pelauw, Kab. Maluku Tengah

7.1.8. Kegiatan Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan PPN Ambon pada tanggal 28 November 2024. Kegiatan bertujuan untuk mengevaluasi layanan yang telah diberikan kepada stakeholder, masyarakat nelayan, dan pelaku usaha industri perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menilai tingkat ketaatan dan kepatuhan stakeholder serta pelaku usaha industri perikanan terhadap aturan dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kontrak yang telah ditandatangani

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Jafar Sahubawa, yang sekaligus memberikan arahan serta sertifikat penghargaan kepada pelaku usaha yang dinilai sangat baik dalam menaati peraturan. Penghargaan tersebut diberikan kepada tiga perusahaan, yaitu PT Harta Samudera, PT Tri Satria Samudera, dan PT Intimas Surya.

Kegiatan dihadiri oleh 30 peserta, yang terdiri dari pengusaha industri perikanan serta pemilik atau pengurus kapal perikanan. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi secara panel oleh narasumber. Adapun narasumber dan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Moh. Nurchayadi, S.Pi - KaSubbag Umum: Kerjasama Tiongkok dengan Indonesia.

- Ricardo A. Siringoringo, S.Pi - Ketua Tim Kerja TKPU: Kebijakan Pelaksanaan Pengusahaan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.
- Mohammad Fadel Triyogo, S.tr.Pi - P3T ahli Pertama: Evaluasi Penggunaan Tanah/Bangunan dan Kepatuhan Pengguna Jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.
- Atri Malein Uneputty - Kadis Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di Kawasan Pelabuhan Nusantara Ambon.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dua peserta mengajukan pertanyaan, yaitu kepada Ketua Tim Kerja TKPU mengenai laporan produksi alur load yang dialihkan ke perusahaan lain, serta kepada Kasubbag Umum terkait persyaratan kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam daerah penangkapan ikan di WPP 718. Setiap pertanyaan dijawab dengan jelas oleh narasumber disertai penjelasan tambahan untuk memperjelas pemahaman peserta.



Gambar 37. Kegiatan Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan

7.2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Kegiatan Fisik)

7.2.1. Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas

Berdasarkan program dan kegiatan PPN Ambon di tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas yang bertujuan untuk mendukung peningkatan aktivitas operasional, peribadatan dan perkantoran. Ini dilakukan dalam rangka mendukung keberlanjutan dan efisiensi kegiatan perikanan tangkap, serta pengelolaan administrasi yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara umum, kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur fisik, seperti gedung kantor, ruang peribadatan, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasional perikanan tangkap dan administrasi terkait. Tentu saja, seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus mematuhi prosedur yang ada dalam peraturan tersebut untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan proyek.

7.2.1.1. Rehab Rumah Ibadah

Mesjid Alim Pattimura di PPN Ambon, yang dibangun pada tahun 2014, merupakan fasilitas penting sebagai tempat peribadatan umat Muslim, baik untuk pegawai maupun masyarakat sekitar. Pada tahun 2024, dilakukan pengadaan rehabilitasi atau perbaikan khususnya pada bagian kubah yang mengalami kebocoran, yang mengganggu aktivitas peribadatan.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 30/PPK/PPN.A.PL.420/II/2024, pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Rizky Utama dengan jadwal pelaksanaan dari tanggal 19 Februari hingga 28 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 293.000.000,-.

Dengan adanya rehabilitasi ini, diharapkan kubah yang bocor dapat diperbaiki sehingga kegiatan peribadatan dapat berjalan lancar tanpa gangguan.



Gambar 38. Pekerjaan Rehab Rumah Ibadah

7.2.1.2. Rehab Gudang

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 88/PPK/PPN.A/PL.420/ V/2024, pekerjaan rehab gudang PPN Ambon dilaksanakan oleh CV. Salfahila dengan jadwal pengerjaan mulai tanggal 17 Mei – 15 Juni 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.548.000,-. Pekerjaan rehab gudang bertujuan memperbaiki kerusakan pada atap dan pintu utama, plesteran dan pengecatan pada dinding gudang yang sudah pudar dan terkelupas, serta memperbaiki instalasi elektrik dan mekanikal.



Gambar 39. Pekerjaan Rehab Gudang

7.2.1.3. Pembuatan Trotoar Jalan

Guna memberikan kenyamanan dan penataan kembali badan jalan di lingkungan perkantoran PPN Ambon, dilaksanakan kegiatan pembuatan trotoar jalan di sepanjang segitiga (persimpangan jalan) depan kantor utama. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Charly Jaya dengan jadwal pelaksanaan pengerjaan dari

tanggal 17 Mei hingga 20 Juni 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.094.000,- berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 88/PPK/PPN.A/PL.420/V/2024.



Gambar 40. Pekerjaan Pembuatan Jalan Trotoar

7.2.1.4. Interior Room Control

Pekerjaan interior pada *room control* yang terletak di lantai 2 kantor PPN Ambon berupa pembuatan *backdrop* dinding yang juga berfungsi sebagai dudukan TV. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Prima Tama dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 02 hingga 14 April 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 42.380.000,- berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 65/PPK/PPN.A/PL.420/IV/2024.



Gambar 41. Pekerjaan Interior Room Control

7.2.1.5. Rehab Drainase

Pekerjaan rehab drainase di sepanjang rumah dinas PPN Ambon dilakukan untuk memperbaiki masalah tidak adanya elevasi kemiringan dasar drainase yang menyebabkan air yang selalu tergenang, dan adanya kerusakan dinding drainase pada beberapa titik. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh penyedia jasa perorangan Fahmi Idris berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 53/PPK/PPN.A/PL.420/III/2024, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 21 Maret hingga 04 April 2024, dengan nilai kontrak Rp. 50.000.000,-.



Gambar 42. Pekerjaan Rehab Drainase

7.2.2. Pemeliharaan Fasilitas

7.2.2.1. Pemeliharaan Instalasi Listrik

Kegiatan pemeliharaan instalasi listrik di kawasan pelabuhan meliputi penggantian instalasi atau kabel yang telah rusak dengan maksud agar dalam penggunaan serta pengoperasiannya tidak membahayakan petugas maupun pihak lainnya. Selain itu, pemeliharaan ini juga bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan perlengkapan dan fasilitas yang menggunakan daya listrik untuk mendukung pelayanan kepada pengguna jasa. Di samping itu, juga akan memperpanjang masa pakai/penggunaan instalasi listrik supaya bisa bertahan lebih lama.



Gambar 43. Pemeliharaan Panel Induk Listrik dan Lampu Jalan Kawasan Kantor

7.2.2.2. Pemeliharaan Instalasi Air

PPN Ambon memiliki fasilitas pelayanan air bersih untuk melayani kebutuhan suplai air bagi kapal perikanan serta pengguna jasa lainnya yang berada dalam kawasan PPN Ambon. Kegiatan pemeliharaan instalasi air bersih yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu perbaikan instalasi pipa di perumahan dinas, pemasangan pipa dari bak induk, serta kegiatan lainnya terkait pelayanan jasa air bersih.



Gambar 44. Perbaikan Pipa Instalasi Air

7.2.2.3. Pemeliharaan Forklift

Seperti halnya peralatan mesin lainnya, bagian mekanik forklift juga cenderung mengalami keausan akibat penggunaan yang dilakukan secara terus menerus. Agar forklift dapat bertahan lama, maka petugas yang menangani forklift di PPN Ambon secara rutin melakukan beberapa perawatan atau pemeliharaan.



Gambar 45. Forklift

7.2.2.4. Pemeliharaan Dermaga

Pemeliharaan dermaga dilakukan pada pos dermaga, di mana ditemukan beberapa kerusakan diantaranya kerusakan berat pada atap dan plafon. Pekerjaan pemeliharaan dermaga mencakup pengecoran atap beton dan perbaikan lainnya pada pos dermaga guna menata kembali fungsi pos sebagai aktifitas pelayanan bagi petugas pendataan. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 177/PPK/PPN.A/PL.420/XI/2024, pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia jasa perorangan Fahmi Idris, waktu pengerjaannya dari 18 November – 17 Desember 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp 53.308.000,-.



Gambar 46. Pemeliharaan Dermaga

7.2.2.5. Pemeliharaan Gedung Bertingkat

Pemeliharaan gedung ini dilakukan pada beberapa titik lokasi yakni gedung kantor utama, perbaikan papan nama kantor dan perbaikan ruang pelayanan lantai 2. Pekerjaan pemeliharaan mencakup perbaikan kerusakan pada atap, plafon serta

perbaikan elevasi kemiringan dak lantai dua ruang pelayanan, penataan kembali papan nama kantor, dan pemeliharaan pada kantor utama (plafon pada ruangan petugas PIT dan kamar mandi, penggantian kloset pada kamar mandi wanita, serta perbaikan atap bocor). Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 164/PPK/PPN.A/PL.420/X/2024 dengan CV. Salfahila sebagai pelaksana pekerjaan, dengan waktu pengerjaannya dari 23 Oktober hingga 21 November 2024, dan nilai kontrak sebesar Rp 108.935.000,-.



Gambar 47. Pemeliharaan Gedung Bertingkat

7.2.3. Pengadaan Barang

7.2.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin (Sarana Penunjang PNBPN)

Adapun kegiatan pengadaan peralatan guna memenuhi standar kebutuhan operasional kantor, selama tahun 2024 antara lain :

- 1) TV LED Polytron 55 HD UHD 55UG5959 sebanyak 4 unit



Gambar 48. Pengadaan TV LED Polytron

- 2) *Video wall controller* DS-C12L-0204H sebanyak 1 unit



Gambar 49. Pengadaan Video Wall Controller

- 3) *Logitech video conference* sebanyak 1 unit



Gambar 50. Pengadaan Video Conference

7.2.3.2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Adapun kegiatan pengadaan peralatan guna memenuhi standar kebutuhan operasional kantor, selama tahun 2024 antara lain:

- 1) Pengadaan Laptop (Acer / Notebook nitro 5 (AN5 15-58-19/0041) sebanyak 1 unit, Zyrex Cruiser 20 15K – 184190-LTN-189510465 sebanyak 5 unit, dan Acer Veriton N4 Core-i5 (VNA/0016) sebanyak 1 unit.



Gambar 51. Pengadaan Laptop

- 2) Pengadaan telepon seluler Apple Iphone 13 sebanyak 1 unit guna mendukung kegiatan kehumasan.



Gambar 52. Pengadaan Telepon Seluler

- 3) Pengadaan perangkat SSB 1 paket yang terdiri dari 1 unit ICOM IC-710, power supply RTVC-60 A 1 unit, antena shakespeare 393 1 unit, 4 buah connector RG8, kabel RG8 sepanjang 20 meter, antene tuner, dan antene bentangan.



Gambar 53. Pengadaan Perangkat SSB

7.2.3.3. Pengadaan Sarana Perkantoran

Adapun kegiatan pengadaan peralatan guna memenuhi standar kebutuhan operasional kantor, selama tahun 2024 antara lain :

- 1) Printer Canon Pixma G2010 sebanyak 4 unit



Gambar 54. Pengadaan Printer

- 2) Scanner Epson DS360W sebanyak 2 unit



Gambar 55. Pengadaan Scanner

- 3) Meja rapat 1 set dan kursi kerja Indachi D2016AL sebanyak 15 unit



Gambar 56. Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Kerja

- 4) Pengadaan Smartboard / Papan tulis interaktif Samsung Flip 75 – WM75B



Gambar 57. Pengadaan Smartboard/Papan Tulis Interaktif

- 5) Pengadaan PC Mini Acer Veriton N4 Core-15 (VNA/0016) sebanyak 1 unit



Gambar 58. Pengadaan PC Mini

6) Pengadaan AC Polytron PAC 18VH 2 PK sebanyak 1 unit



Gambar 59. Pengadaan AC

7.2.3.4. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Yamaha X Ride 125)



Gambar 60. Pengadaan Kendaraan Roda 2

7.3. Penghargaan/Prestasi

PPN Ambon berhasil meraih penghargaan peringkat ketiga pada kategori Satker dengan jumlah transaksi Digipay terbanyak untuk periode semester II Tahun Anggaran 2024.



Gambar 61. Penghargaan Peringkat III Kategori Satker untuk Transaksi Digipay

7.4. Kaleidoskop 2024

Kaleidoskop 2024 ini disusun sebagai dokumentasi visual dari rangkaian peristiwa penting yang telah terjadi sepanjang tahun 2024. Melalui rangkaian foto dan narasi singkat, kaleidoskop ini menghadirkan kilas balik perjalanan setahun penuh, sekaligus menjadi refleksi atas upaya dan pencapaian yang telah diraih. Setiap gambar adalah sebuah cerita, dan setiap narasi adalah sebuah catatan sejarah yang menggambarkan semangat kolaborasi, dedikasi, dan inovasi.

Januari 2024



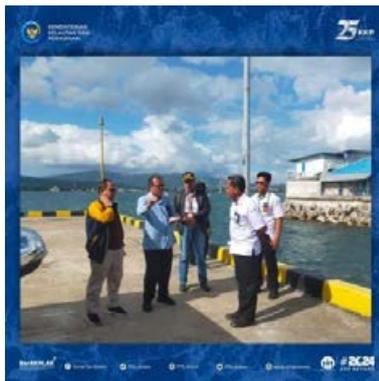
AMBON (04/01) – Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui layanan investasi, Kepala Pelabuhan melakukan Penandatanganan kontrak perjanjian penggunaan bangunan dengan CV. Dian Samudera.

AMBON (05/01) - Pegawai PPN Ambon mengikuti rapat konsolidasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dilaksanakan secara daring. Dalam arahnya, Pak Dirjen mengharapkan para pegawai dapat merubah cara dan pola kerja yang baru dengan semangat dan dedikasi yang dapat diaplikasikan dalam kebiasaan atau budaya kerja di setiap unit kerja masing-masing.



AMBON (23/01) - Tim kearsipan PPN Ambon melaksanakan sosialisasi penggunaan *Portal Collaboration Office* bagi pegawai ASN PPN Ambon dalam rangka optimalisasi dan implementasi penggunaan modul korespondensi *Portal Collaboration Office*.

Februari 2024



AMBON (28/02) Disela kunjungan ke SKPT Moa, Pak Inspektur II & Dir. KP melihat aktivitas pendaratan ikan di dermaga PPN Ambon sambil berdialog dengan petugas pendataan dan ABK kapal.

Maret 2024



AMBON (05/03) – Ketua tim kerja TKPU & Syahbandar melakukan pendampingan lapangan dalam rangka persiapan Proyek IFP-IFM Phase II – PRF lender ADB. Kegiatan kunjungan lapangan ini bertujuan untuk: mengkategorikan tingkat dampak terhadap *safeguard* sosial dan lingkungan, mengidentifikasi masalah potensial dalam menentukan cakupan aktivitas proyek untuk menghindari risiko sejak awal tanpa mengorbankan tujuan pengembangan dan memperkenalkan persyaratan ADB dan membandingkannya dengan persyaratan nasional dan lokal, serta implikasinya terhadap proyek.

ARU (13/03) – Kepala PPN Ambon mendampingi rombongan DJPT-PSDKP-PDS melaksanakan kunjungan lapangan atau kerja sama hulu-hilir bisnis perikanan tangkap di Kota Tual dan Kepulauan Aru Provinsi Maluku.



April 2024



AMBON (04/04) – Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui layanan investasi, Kepala Pelabuhan melakukan penandatanganan kontrak perpanjangan perjanjian penggunaan tanah dan bangunan dengan Fatma Kamah.

AMBON (22/04) - Kepala PPN Ambon Jafar Sahubauwa menghadiri kegiatan Rakor Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku dengan TEMA : Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Utama Guna Percepatan Tranformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.



AMBON (30/04) – Katimja Operasional PPN Ambon Ibu Mona menghadiri pertemuan reguler “Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Maluku” yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) yang dihadiri oleh pejabat daerah, keanggotaan unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, stakeholder bidang perikanan, nelayan, supplier dan LSM/NGO.

Mei 2024

AMBON (06/05) – PPN Ambon menjadi narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek Pengisian dan Penggunaan Logbook/E-Logbook Penangkapan Ikan bagi nelayan/nahkoda kapal di Pelabuhan Perikanan dan sentra nelayan di Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat dan di Dusun Parigi Desa Wahai Seram Utara.



Ambon (12/05) – Syahbandar PPN Ambon Bpk. Ramli Makkawaru mewakili Kepala Pelabuhan mengikuti upacara penyambutan kedatangan KRI Teluk Wondama di Pangkalan TNI AL Halong Ambon dalam rangkaian kegiatan “Operasi Trisila TNI AL 2024” oleh Komando Armada III TNI AL.

Juni 2024

AMBON (06/06) - Mendorong percepatan dan dukungan penerapan modeling PIT, Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa menerima dan menghadiri rapat bersama Tim Modeling PIT yang dipimpin Direktur Perizinan dan Kenelayanan, dan Direktur Pelabuhan Perikanan. Hadir dalam rapat dimaksud Inspektur II KKP bapak M. Lutfi beserta para Katimja dan staf DJPT. Dalam rapat tersebut juga dibahas Isu isu terkait penerapan PNBP SDA di lapangan sebagai masukan dalam menyusun dan melakukan perbaikan regulasi.





AMBON (12/06) - Kepala PPN Ambon Jafar sahubauwa menerima kunjungan Tim JICA, Japan yang telah bekerjasama dengan KKP di PPN AMBON hari ini. Kunjungan bertujuan untuk mendapatkan informasi penyampaian aktivitas pelabuhan, potensi jalur distribusi ekspor dan kemungkinan mitra bisnis yang sesuai dalam impor ikan dan diskusi tentang PPN Ambon.

AMBON (26/06) – Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di pelabuhan, dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Tim Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Kegiatan ini melibatkan petugas SKM PPN Ambon.



Juli 2024



Dalam rangka penerapan tata kelola lingkungan yang baik dan evaluasi implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (Selaraskan) serta untuk pencapaian IKU Tata Kelola lingkungan di Pelabuhan Perikanan, hari ini Tim Selaraskan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan kegiatan Pengujian Kualitas Air Kolam dan Limbah Drainase serta Emisi Kendaraan di lingkungan kerja PPN Ambon.

Kepala PPN Ambon Jafar Sahubauwa dan tim WPPNRI – 715 menghadiri rapat koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI – 718 yang dilaksanakan oleh PPN Tual di The City Hotel Ambon (4-5 July). Rapat Koordinasi LPP WPPNRI - 718 ini dilakukan dalam rangka implementasi salah satu program prioritas KKP yaitu tentang kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) khususnya di wilayah Zona III.



Tim Selaraskan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan kegiatan Pengujian Kualitas Air Minum dan Uji Kualitas udara (CO) di lingkungan kerja PPN Ambon. Pengujian Kualitas Air Minum dan Uji Kualitas udara (CO) di lingkungan kerja PPN Ambon ini agar memastikan air yang kita konsumsi aman dan udara yang kita hirup bebas dari kontaminan berbahaya, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman bagi semua.

Agustus 2024

AMBON (08/08) - Dalam rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI,) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) tahun 2024 dengan mengangkat produk unggulan daerah, PPN Ambon terus mendorong para pelaku usaha sektor perikanan untuk giat meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan yang menjadi produk unggulan provinsi Maluku. Maluku dengan potensi perikanan yang mendunia menjadikan produk tuna sebagai primadona pangsa ekspor.





PPN Ambon kembali menggelar lomba bakar ikan yang seru dan penuh semangat. Acara ini diikuti oleh kelompok-kelompok kerja PPN Ambon, UPT KKP Ambon, DWP PPN Ambon, serta para stakeholder. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi kuliner yang lezat, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara kita semua.

September 2024

Mengakhiri kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Saumlaki, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Irjen Polisi Lotharia Latif, M.Hum mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Disambut Kepala Pelabuhan, Dirjen Perikanan Tangkap berkesempatan bertatap muka dengan pegawai PPN Ambon.



Kepala PPN Ambon menerima kunjungan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan ikan Bpk Mohammad Idnillah bersama Tim Investasi Tiengkong di PPN Ambon. Dalam kunjungannya Tim Investasi asal Tiengkong yang didampingi Direktur KAPI meninjau aktifitas pembongkaran ikan serta aktifitas pengolah ikan di beberap Unit Pengolahan ikan yang ada di PPN Ambon dan diluar PPN Ambon.

Oktober 2024

Kepala PPN Ambon Jafar Sahubauwa membacakan sambutan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada kegiatan Peresmian Fasilitas *Solar Ice Maker* di Desa Kawa, Seram Bagian Barat, Maluku yang difasilitasi oleh *The United Nations Development Programme* (UNDP) dan Yayasan IPNLF Indonesia (YII). Dalam sambutannya Kepala PPN Ambon menyampaikan pesan DIRJEN TANGKAP bahwa pertama-tama kami mengucapkan terimakasih kepada UNDP dan YII yang telah memfasilitasi program ini demi kemajuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di Seram Bagian Barat. Peresmian pabrik es merupakan suatu terobosan mengingat es memegang peran penting dalam proses penangkapan ikan serta pengolahannya.



Kepala PPN Ambon dan Staf mengikuti rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta langkah langkah optimalisasi penarikan PNBP SDA Perikanan secara daring (online) bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka perbaikan tata kelola perikanan nasional serta pemantauan dan penguatan pelaksanaan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya alam (SDA) perikanan di pelabuhan pangkalan.

November 2024

Kepala PPN Ambon Jafar Sahubauwa menghadiri pembukaan kegiatan THE 2ND INTERNATIONAL SEMINAR ON OCEAN SCIENCE AND SUSTAINABILITY (ISOSS) dengan topik “Navigating the Blue Frontier: Measured Fishing and Ocean Science in Harmony” yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.



Di sesi lainnya Kepala PPN Ambon berkesempatan menyampaikan laporan kegiatan PPN Ambon atas kerjasama dengan GeF 6 – WWF dari tahun 2022 hingga 2024 untuk diketahui bersama.



Kepala Pelabuhan Jafar Sahubauwa memimpin internalisasi program prioritas KKP pada sektor perikanan tangkap dalam mendukung program Kabinet Merah Putih. Internalisasi Program Prioritas KKP pada sektor perikanan tangkap ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelaku perikanan memahami dan mendukung kebijakan strategis yang sejalan dengan visi Program Kabinet Merah Putih. Dengan internalisasi ini, diharapkan sinergi

antara pemerintah, nelayan, dan pelaku usaha dapat terwujud dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada ketahanan pangan serta ekonomi nasional.

Desember 2024

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-28, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon menggelar acara Makan Patita dengan menu bergizi ikan. Makan Patita adalah merupakan tradisi Orang Maluku dalam suatu jamuan makan bersama dalam kegiatan kegiatan adat dengan ala lesehan dengan aneka menu sajian khas Maluku dari hasil pertanian dan perikanan. Kepala Pelabuhan juga menyampaikan bahwa konsep makan Patita ini juga sejalan dengan program pemerintah yaitu makan bergizi gratis (MBG).





Kepala Sub Bagian Umum, Ketua Tim Kerja Operasional dan Syahbandar PPN Ambon menerima kunjungan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur di PPN Ambon. Kunjungan ini dalam rangka oerientasi dan apresiasi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan wawasan untuk pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Kutai Timur.

Kepala PPN Ambon, Jafar Sahubawa menerima kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bpk. Bahlil Lahadalia bersama rombongan di PPN Ambon. Kunjungan Bpk Menteri dalam rangka meninjau fasilitas dan penyaluran BBM Subsidi bagi kapal-kapal nelayan. Dalam peninjauannya di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) PPN Ambon, Menteri ESDM disambut oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon bersama Pengelola SPBUN. Adapun tujuan kunjungan ini dalam rangka monitoring implementasi kebijakan subsidi energi untuk nelayan, memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi yang mendukung aktivitas perikanan, serta mendengar aspirasi langsung dari para nelayan terkait kebutuhan energi mereka.





PERMASALAHAN TINDAK LANJUT



BAB VIII. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan program pengelolaan perikanan tangkap yang mencakup berbagai kegiatan yang diimplementasikan sepanjang tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, ditemukan beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, baik dari segi operasional, teknis, maupun non-teknis. Permasalahan yang muncul ini memerlukan pendekatan solutif yang tepat dan terukur agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam operasional beserta upaya pemecahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

8.1. Tim Kerja Operasional Pelabuhan

▪ Permasalahan:

1. Kurangnya data dan informasi kegiatan dari masing-masing Tim Kerja.
2. Keterbatasan informasi tentang kegiatan operasional pelabuhan.
3. Kesulitan dalam mengakses data dan informasi kegiatan.

▪ Tindak Lanjut:

1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing ketua Tim kerja untuk setiap kegiatan dapat didokumentasikan dan dinarasikan.
2. Membuat sistem pengumpulan data dan informasi kegiatan yang terstruktur dan terintegrasi.
3. Menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kegiatan.
4. Membuat laporan kegiatan operasional pelabuhan secara berkala.
5. Membuat publikasi tentang kegiatan operasional pelabuhan melalui media sosial dan website PIPP.

8.2. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

▪ Permasalahan:

1. Keterbatasan lahan industri.
2. Perawatan fasilitas yang kurang memadai.
3. Kurangnya promosi dan publikasi tentang layanan usaha di pelabuhan.

▪ Tindak Lanjut:

1. Melakukan evaluasi tentang penggunaan lahan industri yang ada.
2. Membuat rencana pengembangan lahan industri untuk meningkatkan kapasitas.

3. Melakukan perawatan fasilitas secara berkala untuk memastikan kualitas dan keselamatan.
4. Membuat prosedur perawatan fasilitas yang terstruktur dan terintegrasi.
5. Membuat pelatihan untuk petugas tentang perawatan fasilitas yang benar.
6. Membuat promosi dan publikasi tentang layanan usaha di pelabuhan melalui media sosial dan website PIPP.

8.3. Tim Kerja Kesyahbandaran

▪ **Permasalahan:**

1. Penggunaan aplikasi e-PIT sering menemui kendala dalam penginputan data kapal.
2. Aplikasi e-PIT terkoneksi dengan pelabuhan lain, sehingga kesalahan penginputan operator dapat berdampak menghambat kelancaran proses di pelabuhan lainnya.
3. Keterbatasan akses untuk melakukan perbaikan/perubahan pada aplikasi e-PIT.

▪ **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan konsultasi dengan operator dari pelabuhan lain dan admin pengelola aplikasi.
2. Membuat permohonan akses untuk melakukan perbaikan/perubahan pada aplikasi e-PIT.
3. Membuat pelatihan untuk operator tentang penggunaan aplikasi e-PIT yang benar.
4. Membuat prosedur penginputan data kapal yang terstruktur dan terintegrasi.
5. Membuat evaluasi tentang penggunaan aplikasi e-PIT.
6. Membuat rencana perbaikan untuk aplikasi e-PIT.

8.4. Dukungan Manajerial

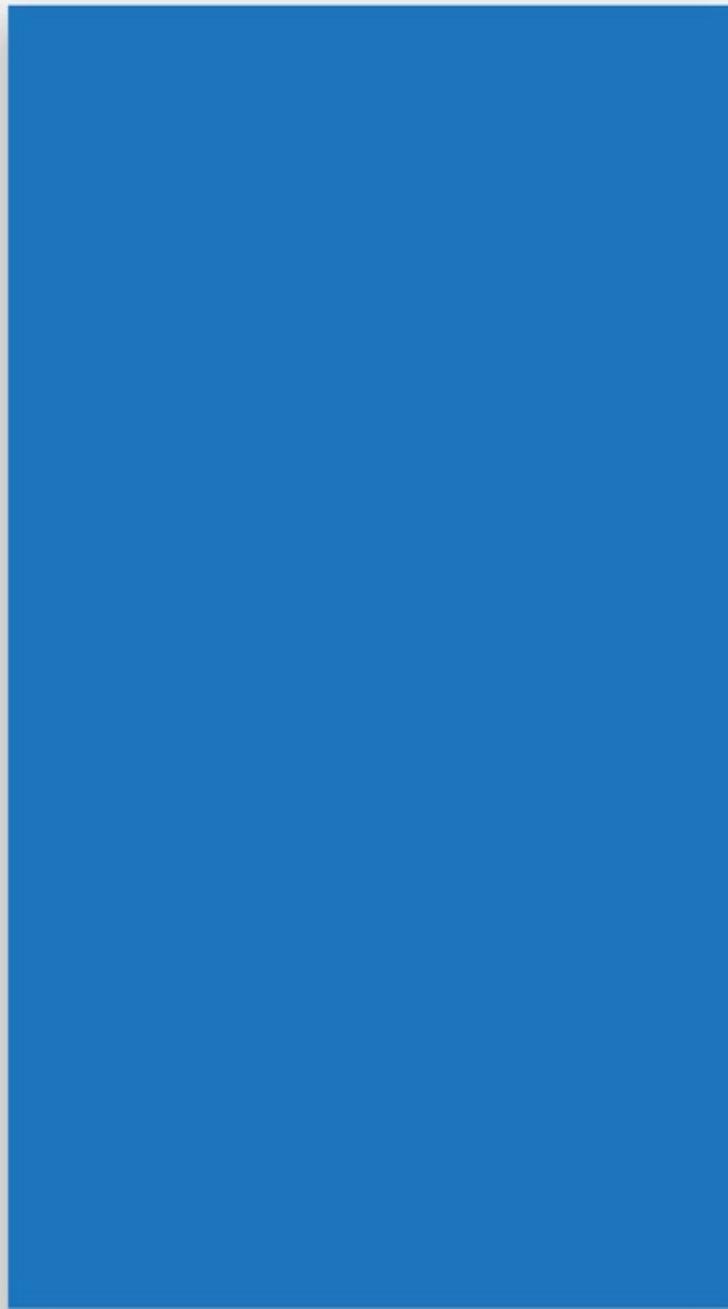
▪ **Permasalahan:**

1. Selisih kompetensi yang besar antara pegawai dan target kompetensi di Standar Kompetensi Jabatan.
2. Kekurangan target kompetensi yang akan dicapai karena selisih kompetensi tersebut.
3. Kemungkinan adanya kesenjangan antara kemampuan pegawai dan tuntutan pekerjaan.
4. Terdapat pagu blokir AA yang mana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tidak dibuka.

▪ **Tindak Lanjut:**

1. Evaluasi Kompetensi: Melakukan evaluasi kompetensi pegawai untuk mengetahui kemampuan dan kekurangan mereka.
2. Pembuatan Rencana Pengembangan: Membuat rencana pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka.
3. Pelatihan dan Pengembangan: Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Memantau dan mengevaluasi kemajuan pegawai dalam mencapai target kompetensi.
5. Revisi Standar Kompetensi Jabatan: Merevisi Standar Kompetensi Jabatan jika diperlukan untuk memastikan bahwa target kompetensi yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai.
6. Tetap menjalankan kegiatan prioritas sesuai target walaupun anggaran diblokir.
7. Mencari alternatif sumber anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai target kegiatan.

PENUTUP



BAB IX. PENUTUP

Laporan Tahunan 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja Pelabuhan Perikanan Ambon selama satu tahun terakhir. Laporan ini mencerminkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari pencapaian kinerja yang berhasil diraih, baik dalam hal kualitas pelayanan publik, akuntabilitas anggaran, kinerja operasional, maupun pemenuhan target kinerja yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja.

Pencapaian tersebut diraih meskipun dihadapkan pada tantangan, seperti *refocusing* atau pemotongan anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, serta keterbatasan pembiayaan untuk pemeliharaan fasilitas. Namun, dibalik keberhasilan yang dicapai, terdapat target yang belum terpenuhi, yakni PNBK dari Sumber Daya Alam (SDA) pasca produksi yang masih di bawah target. Selain itu, pencapaian operasional yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya meliputi berkurangnya jumlah kapal yang berpangkalan, penurunan volume penyaluran es ke kapal perikanan, serta penurunan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan terobosan dan strategi yang tepat sebagai solusi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan komitmen yang kuat, inovasi, serta sinergi yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan agar target yang belum tercapai dapat direalisasikan dan kinerja operasional yang lebih baik lagi.

Disadari bahwa pencapaian yang telah diraih tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan PPN Ambon.

Dukungan serta kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mendukung kegiatan prioritas DJPT yaitu PIT dan TCG termasuk juga dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana perluasan areal PPN Ambon.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah, nelayan, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami peran dan kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon bagi pembangunan sektor perikanan dan ekonomi di daerah ini.